

WACANA

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin

E-ISSN 2798-9356

P-ISSN 2355-8326

Vol.12 No 1

Juni 2025

Investasi Asing Dalam Industri Pariwisata Bali: Sebuah Pandangan Terkait Praktik New Imperialism Bagi Kearifan Lokal

(Ida Ayu Galih Pramesti Maharani, Ni Wayan Rainy Priadarsini)

Definisi Konseptual E-Government dan E-Governance : Analisis Komparatif

(Erinda Alfiani Fauzi, Nike Purnamawati)

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Tabore Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas)

(Yoga, Imanuel Jaya, Edward Mello Bertho)

Dampak Penyelenggaraan KTT Archipelagic and Island States Forum 2023 Terhadap Pariwisata di Bali

(Ida Ayu Devina Radharani Adinatha, Ni Wayan Rainy Priadarsini)

Strategi Komunikasi Politik Partai Gerindra Di Kota Palangka Raya Dalam Pemilu 2024 Dan Pilkada 2025

(VAbdul Rahman, Anita Pransiska, Enika R Siagian, Mochammad Fernanda Fajeri, Salsabila, Ali Sunarno, Eli Karliani)

Implementasi Desentralisasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Pemerintahan Daerah

(Al Hafiz Rasya Ramadhan, Hudaidah)

Pengaruh Stabilitas Keamanan Indo-Pasifik melalui AOIP terhadap Ketegangan China-Taiwan dalam Penyelesaian Sengketa Maritim

(Muh. Nurfaiz Fahmi, Imam Fadhil Nugraha)



Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Palangka Raya

ISSN 2798-9356





Investasi Asing dalam Industri Pariwisata Bali: Sebuah Pandangan Terkait Praktik *New Imperialism* Bagi Kearifan Lokal

Ida Ayu Galih Pramesti Maharani¹, Ni Wayan Rainy Priadarsini²

Universitas Udayana

Email: maharani.2212521049@student.unud.ac.id

Article Info

Keywords:

Foreign investment, Tourism Industry, New Imperialism, Local Wisdom.

Received 05/12/2024

Accepted 19/12/2024

Available online 30/12/2024

Abstract

Foreign investment has a significant role in the development of the tourism industry in Bali and contributes to local economic growth. However, the dominance of foreign capital can pose challenges to the existence of local wisdom, economic dependence, and exploitation of local resources. This paper examines foreign investment in Bali's tourism industry through the perspective of new imperialism using a descriptive qualitative approach. This research shows that there are still foreign investment practices that are not accordance with local wisdom values, but only concerned with profit expansion. This can cause cultural degradation and socio-economic inequality, especially for local Balinese people. With this, concrete steps are needed in the form of collaboration between the government, local communities, and foreign investors to be able to create sustainable tourism development and maintain local traditions.

A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, lapangan pekerjaan, pertukaran budaya dan memberikan peluang bagi Indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai destinasi wisata global. Industri pariwisata menjadi industri yang berperan dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) melalui berbagai aspek seperti transportasi, akomodasi, destinasi wisata, budaya dan kuliner. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali menjadi daya tarik bagi investasi asing. Industri pariwisata memiliki peran sentral untuk perekonomian di Bali. Selain menjadi penggerak dalam penciptaan lapangan kerja, pariwisata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali serta diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional

yang populer di dunia, banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali, sehingga memberikan peluang bagi investor dalam negeri maupun asing untuk melakukan investasi. Muncul berbagai proyek pariwisata yang didanai oleh modal asing untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali.

Investasi asing memainkan peran terhadap masifnya pengembangan industri pariwisata di Bali. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rata-rata investasi asing di Bali meningkat sebesar 26% sepanjang tahun 2020-2023. Bali menjadi provinsi dengan jumlah realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbanyak dalam sektor pariwisata di Indonesia dengan jumlah total 2.513 proyek sebesar 219.851.800 Dollar AS atau sekitar Rp 3,25 triliun pada sektor hotel dan restoran (Kompas, 2024). Penanaman modal asing berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata, karena diperlukan biaya atau modal yang cukup besar bukan hanya dari pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Namun, keterlibatan modal asing juga dapat memunculkan tantangan bagi masyarakat lokal Bali. Adanya investasi asing diharapkan dapat memajukan industri pariwisata ke arah yang positif dengan meningkatkan devisa negara, membuka lapangan kerja, peningkatan dalam pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing adalah aktivitas penanaman modal oleh investor asing untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik dengan menggunakan seluruhnya modal asing maupun melalui kerja sama dengan investor domestik. Penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat serta menjaga kelestarian lingkungan setempat. Hal ini juga berlaku bagi pelaku penanaman modal asing bagi industri pariwisata. Investor asing diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pembangunan dan pengembangan industri pariwisata berbasis investasi asing sesuai dengan prinsip masyarakat lokal Bali.

Pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan mengenai penanaman modal yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 30 Ayat (2) yang menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempertegas kebijakan

penanaman modal asing termasuk tata cara, pembinaan dan pelaporan bagi investor. Kebijakan investasi yang telah diterapkan mencakup peraturan daerah yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan investasi, memberikan keringanan dalam pajak, retribusi, serta pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Industri Pariwisata merupakan Kumpulan berbagai usaha di bidang pariwisata yang saling berhubungan guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan. United Nations World Tourism (UNWTO) dalam the *International Recommendations for Tourism Statistics 2008* menyatakan bahwa industri pariwisata mencakup akomodasi untuk pengunjung; kegiatan layanan makanan dan minuman; angkutan penumpang; agen perjalanan wisata dan kegiatan reservasi lainnya; kegiatan budaya; kegiatan olahraga dan hiburan. Sektor pariwisata menjadi sektor penunjang ekonomi negara yang dapat memberikan dampak pada diversifikasi ekonomi. Pariwisata membantu negara dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, karena industri pariwisata juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan hubungan antarbudaya yang dapat memperkuat integrasi ekonomi dunia.

Namun, terdapat sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh investor asing dalam pelaksanaan prosedur investasi di bidang industri pariwisata, salah satunya adalah operasional industri pariwisata yang tidak sesuai dengan tradisi, adat, dan budaya masyarakat Bali. Praktik investasi asing dianggap sebagai salah satu bentuk *new-imperialism* atau imperialisme modern dalam bidang pariwisata. Negara-negara maju berperan sebagai penyedia dana atau modal dalam pembangunan industri pariwisata di Bali, sedangkan negara berkembang menyediakan lahan dan pekerja. Berdasarkan pernyataan (Lenin, 1917 dalam Loomba, 2005 dalam Aulia, 2018) bahwa negara-negara di Eropa telah menghasilkan modal yang besar dan tidak dapat diinvestasikan karena tidak memiliki buruh dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, negara-negara maju menginvestasikan modalnya di negara-negara koloni. Investasi asing dalam industri pariwisata terdiri dari berbagai macam bentuk termasuk hotel, bar, restoran, dan villa yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat lokal Bali apabila tidak dikelola secara seimbang dan hanya didominasi oleh modal asing.

Regulasi formal menjadi hal yang sangat penting, serta adanya keterlibatan masyarakat adat dalam persetujuan pembangunan industri pariwisata berbasis investasi asing sebelum diterbitkannya izin pembangunan dan operasional. Hal ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dan budaya lokal masyarakat Bali. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menciptakan investasi yang baik melalui adanya kebijakan investasi sektor pariwisata yang didasari oleh penetapan otonomi daerah yang bersifat ekspansif agar memberikan peluang untuk menggerakkan investasi di bidang industri pariwisata dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah “Bagaimana investasi asing pada industri pariwisata Bali dan pandangan terkait praktik *new imperialism* pada kearifan lokal?”

B. LITERATURE REVIEW

Dalam menganalisis isu, penulis menggunakan beberapa artikel jurnal yang relevan dengan topik. Artikel jurnal yang pertama berjudul “*Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali*” oleh Asih, Ratnawati, dan Wirawan tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai investasi asing pada bidang pariwisata juga memerlukan kolaborasi desa adat dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal Bali dan diharapkan mampu mendukung pariwisata berkelanjutan. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, sehingga dapat mendukung keberlanjutan budaya dan ekonomi lokal. Namun, diperlukan analisis data yang empiris dan studi lapangan yang dapat memperkuat argumen agar analisis menjadi lebih praktis dibandingkan teoritis.

Selanjutnya, penulis menggunakan artikel jurnal kedua yang berjudul “*Pariwisata Indonesia di Masa New Imperialism atau Imperialisme Modern : Sebuah Kritik dan Refleksi Terhadap Perencanaan Pengembangan Pariwisata di Borobudur dan Mandalika*” oleh Aulia tahun 2018 yang membahas mengenai tinjauan dan kritik terhadap pembangunan pariwisata yang tidak hanya berpengaruh positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang berasal dari keterlibatan modal asing dalam industri pariwisata domestik. Tulisan ini memberikan pandangan yang kritis terhadap pengembangan pariwisata oleh pihak asing yang dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap investasi asing. Namun,

jurnal ini belum mengidentifikasi solusi atau rekomendasi kebijakan praktis yang dapat dilakukan bagi perencana pariwisata dalam mengatasi isu yang diangkat.

Artikel jurnal ketiga, berjudul “*The Ongoingness of Imperialism : The Problem of Tourism Dependency and The Promise of Radical Equality*” oleh Higgins dan Desbiolles tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai pandangan imperialisme untuk menjelaskan mengenai ketimpangan yang terjadi dalam bidang pariwisata. Selain itu, dibahas mengenai pemahaman historis dari pariwisata yang dianalisis secara kritis dan eksploratif untuk memberikan pandangan terkait praktik kolonial, ketidaksetaraan, dan eksploitasi yang terjadi dalam penerapan bidang pariwisata.

Penulis menggunakan ketiga artikel ini sebagai tinjauan pustaka karena memiliki relevansi dengan isu yang diangkat, yakni mengenai investasi asing pada industri pariwisata yang berfokus di Bali. Dalam menganalisis isu yang diangkat, tulisan ini mendeskripsikan konsep industri pariwisata dan *new imperialism*. Selanjutnya disajikan analisis kritis terhadap operasional industri pariwisata di Bali yang dianggap sebagai bentuk *new imperialism* di era modern yang dapat memberikan dampak bagi pergeseran budaya lokal. Dua konsep tersebut digunakan untuk mengetahui prosedur investasi asing dalam industri pariwisata di Bali dan menjelaskan implementasinya melalui pandangan *new imperialism* terhadap kearifan lokal.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penulisan yang mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber data sekunder melalui artikel jurnal yang relevan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu, dan riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu fenomena secara holistik-kontekstual berdasarkan dengan isu yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis induktif untuk menjelaskan isu investasi asing pada industri pariwisata Bali dan pandangan mengenai praktik *new imperialism* pada kearifan lokal. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, penulis menganalisis dan menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi keterkaitan data satu sama lain.

D. HASIL DAN DISKUSI

Industri Pariwisata dan Prosedur Investasi Asing di Bali

Menurut Dinas Pariwisata Provinsi Bali, terdapat 25 sub sektor industri pariwisata di Bali yang meliputi: angkutan jalan rel wisata, angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri untuk wisata, angkutan sungai dan danau untuk wisata, hotel bintang, hotel melati, villa, apartment hotel, restoran, jasa boga untuk suatu event, penyediaan jasa boga untuk *event* tertentu, penyediaan jasa boga periode tertentu, bar, kelab malam, usaha arena permainan, wisata gua, wisata petualangan alam, arung jeram, wisata selam, wisata memancing, aktivitas wisata air, wisata olahraga minat khusus, klub malam, diskotik, aktivitas SPA (Sante Par Aqua) dan fasilitas gelanggang/ arena. Dalam pembangunan industri pariwisata di Bali, khususnya yang berbasis investasi asing, diperlukan sejumlah persiapan awal yang meliputi penentuan jenis usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), persiapan dokumen dan konsultan. Diperlukan prosedur khusus bagi investor asing untuk mendirikan industri pariwisata di Bali :

1. Investor asing memiliki bentuk badan usaha yang umumnya merupakan PT PMA (Penanaman Modal Asing). Badan usaha ini merupakan perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing.
2. Memastikan agar bidang usaha industri yang akan didirikan terbuka bagi investor asing. Hal ini diatur melalui Daftar Positif Investasi (DPI) oleh Pemerintah Indonesia.
3. Investor memiliki modal minimum sebesar Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan.
4. Memiliki izin legalitas yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapatkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), terdapat izin usaha sektoral, dalam hal ini memiliki izin usaha industri pariwisata.
5. Memiliki struktur perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan direktur. Bagi WNA diwajibkan untuk memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan NPWP.
6. Lokasi usaha wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali dan peraturan zonasi.
7. Mematuhi segala regulasi ketenagakerjaan termasuk UMR Provinsi Bali dan regulasi terkait tenaga kerja asing.

Terkait perizinan usaha industri pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan fasilitasi secara langsung dan tidak langsung, dengan melakukan sosialisasi dan pemeriksaan izin pembangunan dan kesesuaian dengan syarat-syarat industri pariwisata di Bali. Setiap pelaku industri pariwisata yang melibatkan investor asing maupun tidak harus melalui proses verifikasi di sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk legalitas berdirinya suatu industri pariwisata. Isu yang dihadapi terkait dengan investasi asing dalam industri pariwisata Bali adalah terjadinya ketidakseimbangan aktivitas pembangunan infrastruktur pariwisata dalam memenuhi permintaan wisatawan dengan pembangunan bagi kebutuhan masyarakat lokal. Meskipun pembangunan pariwisata memiliki potensi besar bagi perekonomian, salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah dominasi asing terhadap pembangunan di wilayah lokal.

Pasca pandemi COVID-19, Bali mengalami tantangan yang cukup signifikan dalam industri pariwisata. Modal asing memiliki peran dalam mendukung kembalinya pertumbuhan pariwisata Bali karena dapat membantu mempercepat pembangunan proyek-proyek pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan investor asing menjadi hal yang penting untuk mendukung percepatan pertumbuhan industri pariwisata. Selain itu, modal asing juga dapat berperan untuk mempromosikan pariwisata Bali sebagai destinasi wisata internasional. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan industri pariwisata di Bali tentunya bersifat kompleks dan dapat memberikan tantangan bagi masyarakat lokal. Dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki dari modal asing, diperlukan pengelolaan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat agar memberikan manfaat yang optimal bagi kearifan lokal Bali.

New Imperialism dalam Industri Pariwisata

Dalam praktiknya, industri pariwisata seringkali dijadikan sebagai alat kelanjutan dari imperialisme dan kolonialisme di era yang baru. Menurut (Grimwood, et. al., 2019) dalam Higgins (2022) menyatakan bahwa keterkaitan pariwisata dengan kekuasaan kolonial berakar dalam dan kompleks. Imperialisme identik dengan kapitalisme, dalam konteks ini, investor dianggap sebagai kaum kapitalis yang memiliki modal. Sedangkan, negara-negara yang menjadi tujuan investasi merupakan penyedia lahan dan pekerja dalam industri pariwisata. Dominasi imperialisme dan kolonialisme juga dilihat dari hubungan wisatawan

asing dengan pekerja lokal. Pekerja lokal dituntut untuk mengikuti standar yang sesuai dengan permintaan wisatawan asing dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi tanpa memperhatikan budaya lokal. Mengalirnya manfaat ekonomi dari negara-negara berkembang ke negara maju memiliki pola yang sama dengan berbagai perusahaan multinasional pada sektor lainnya yang berkembang sejak industrialisasi dan modernisasi dunia ketiga (Pitana, 2004 dalam Aulia, 2018).

Kolonialisme membentuk keterlibatan negara-negara di belahan bumi selatan dengan pasar pariwisata internasional. Akama (2004) dalam Higgins dan Desbiolles (2022) menjelaskan mengenai pembangunan pariwisata di Kenya yang dibangun diatas struktur kolonial. Pada awalnya pariwisata di Kenya berorientasi dalam melayani kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat dan wisatawan internasional. Setelah kemerdekaan, masyarakat Kenya mengejar investasi asing dan memberikan dampak kepemilikan dan pengelolaan asing atas industri pariwisatanya kepada perusahaan asing dan multinasional. Hal ini mencerminkan terjadinya perampasan lokal dan bentuk imperialisme baru atau *new imperialism* pasca kemerdekaan. Pengembangan pariwisata dalam konteks *new imperialism* yang tidak ditangani, diwujudkan dengan adanya eksploitasi, penyalahgunaan, perampasan, dan komodifikasi sumber daya lokal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pariwisata memiliki sifat kolonialis yang dapat mengganggu otonomi daerah dalam mengambil keputusan. Pariwisata memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi negara, tetapi disisi lain memberikan dampak ketimpangan bagi budaya masyarakat lokal. Terdapat pandangan bahwa budaya memiliki sifat yang fleksibel dan dapat beradaptasi di era global ini. Namun, kebudayaan tidak seharusnya dijadikan sebagai alat komersialisasi dalam rangka mendukung suatu industri pariwisata. Adanya dependensi atau ketergantungan ekonomi menempatkan pariwisata sebagai bentuk imperialisme baru. Pada akhirnya, pariwisata lebih mementingkan kepuasan wisatawan dibandingkan objek wisata yang dikunjungi, yang mana kolonialisme dipandang sebagai simbol yang diwujudkan dengan citra, harapan, dan kekuasaan (Linehan, et. al, 2020 dalam Higgins & Desbiolles, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal dianggap sebagai tenaga kerja atau buruh pariwisata dan penyedia objek pariwisata.

Hubungan antara pariwisata dengan imperialisme dapat dilihat dari kapitalisme pada sistem internasional yang berakibat pada berkurangnya sumber

daya dari negara-negara berkembang. Dalam perspektif Marxisme, pariwisata terutama dalam konteks globalisasi merupakan salah satu bentuk *new imperialism*. Pandangan ini berakar dari ide dasar Marxisme mengenai kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang eksploitatif dan bertujuan untuk mengekspansi keuntungan. Terdapat kepentingan yang bertolak belakang antara investor asing dengan negara penyedia sumber daya. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan asing sering kali mengabaikan atau bahkan merugikan kepentingan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (Ulzikri, 2020). *New imperialism* saat ini telah bertransformasi menjadi dominasi ekonomi melalui modal asing. Investor asing yang memiliki modal besar akan memanfaatkan aturan yang longgar untuk memperluas pengaruh mereka.

Imperialisme menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, disisi lain memberikan ketimpangan ekonomi bagi negara tuan rumah. Pihak-pihak yang berinvestasi di negara berkembang seperti perusahaan multinasional memiliki konsiderasi bahwa negara berkembang memiliki kompetisi yang lebih lemah, sehingga negara maju dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi mereka. Keterlibatan entitas asing ini dapat dianalisis sebagai bagian dari strategi ekonomi, yang mana negara atau perusahaan asing masuk melalui investasi, kerja sama promosi, atau dukungan digital. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap pihak eksternal, yang dapat dikritisi dalam konteks imperialisme baru.

Sebagian besar pendapatan dari sektor pariwisata cenderung dikuasai oleh investor asing, yang kemudian mengalihkan keuntungan tersebut kembali ke negara asal mereka. Selain itu, keterlibatan tenaga kerja asing dengan gaji yang tinggi membuat penduduk lokal sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor pariwisata, karena posisi-posisi manajerial justru akan ditempati oleh orang-orang asing, sedangkan masyarakat lokal diperlukan sebagai tenaga kerja kasarnya. Sehingga, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama kurang dimaksimalkan dan dapat memarginalkan peran masyarakat lokal dalam struktur dominasi imperialistik ekonomi.

Implikasi Terhadap Kearifan Lokal Bali

Kenyataan yang sedang terjadi di era globalisasi ini adalah terjadinya pergeseran budaya lokal beriringan dengan masuknya pihak asing. Dominasi asing berdampak pada transformasi nilai-nilai dan kearifan lokal, karena semakin menuju

ke arah “kebarat-baratan”. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan asing, sehingga masyarakat lokal yang merupakan para pekerja industri pariwisata dilatih untuk menerapkan standar pelayanan dengan gaya barat. Selain itu, aliran modal investasi asing dengan adanya industri pariwisata seperti hotel atau resort kurang terintegrasi dengan barang atau jasa lokal dalam mendukung operasionalnya.

Undang- Undang nomor 25 tahun 2007 pasal 15 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Pembangunan industri pariwisata berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali telah berkembang secara signifikan, sehingga diperlukan tata kelola lingkungan yang sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana, yakni keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Namun, tingginya lonjakan wisatawan yang berkunjung ke Bali dapat berdampak pada tingginya permintaan wisatawan akan pembangunan infrastruktur pariwisata.

Terdapat sejumlah pelanggaran dalam pembangunan industri pariwisata berbasis modal asing yang tidak mematuhi regulasi dan adat istiadat setempat. Pertama, alih fungsi kekayaan alam lokal yang tidak bertanggung jawab. Lahan pertanian hijau dikonversi tanpa adanya izin yang jelas. Hal tersebut terjadi secara masif di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar. Lahan hijau yang diubah menjadi industri pariwisata seperti villa dan hotel, mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian lokal. Selain itu, terjadi pengerukkan pada tebing di wilayah Uluwatu untuk kepentingan pembangunan resort, sementara hotel dan bar dibangun di wilayah sempadan pantai, yang tidak hanya dianggap sebagai wilayah perlindungan ekologis, tetapi juga dipercaya sebagai area yang sakral dan memiliki makna spiritual yang dalam bagi umat Hindu. Kedua, pembangunan industri pariwisata yang terlalu dekat dengan kawasan suci atau Pura dapat mengganggu pelaksanaan upacara adat bagi umat beragama Hindu. Operasional industri pariwisata yang tidak memperhatikan kondusifitas di lingkungan sekitar juga berdampak pada terganggunya prosesi upacara keagamaan dan kenyamanan masyarakat lokal.

Kedatangan wisatawan asing dalam jumlah besar dapat berdampak pada perubahan kondisi sosial budaya. Hal ini berisiko mengikis identitas lokal akibat menurunnya kekuatan modal asing yang dimiliki Masyarakat. Masyarakat

berpotensi untuk menormalisasikan budaya wisatawan asing yang semakin lama terintegrasi dengan kebudayaan lokal. Selain itu, terjadi pergeseran prioritas pembangunan di suatu daerah yang menjadikan pariwisata sebagai fokus utamanya, hal ini disebut dengan “*touristification*”. Demi keuntungan ekonomi, terjadi proses komodifikasi dalam konteks pariwisata, yang didefinisikan sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat tujuan wisata sebagai komoditas pariwisata. Dengan kata lain, terjadi komersialisasi budaya setempat, seperti yang terjadi pada industri pariwisata di Bali. Sebagai contoh, terdapat industri pariwisata hotel yang menggunakan *kober* atau *umbul-umbul*, yakni sarana upacara agama Hindu di Bali sebagai hiasan. Namun, *kober* sebenarnya dianggap sebagai atribut suci keagamaan karena berisi lukisan Dewa- Dewa maupun simbol suci dalam agama Hindu yang biasanya berada di Pura.

Dominasi asing dalam industri pariwisata di Bali dapat dianggap sebagai bentuk *new imperialism* karena terdapat beberapa alasan. Pertama, adanya dominasi ekonomi. Pada umumnya investor asing memiliki modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengusaha local, terutama investor yang berasal dari negara dengan ekonomi yang kuat dan memiliki akses ke pasar modal global. Hal tersebut yang mendorong investor asing untuk menguasai pasar, menentukan target pasar, dan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah terkait pariwisata. Kedua, eksploitasi sumber daya lokal. Investor asing memanfaatkan budaya lokal maupun sumber daya alam yang ada untuk memenuhi target dan berfokus pada keuntungan jangka pendek. Ketiga, menyebabkan ketergantungan ekonomi. Negara yang bergantung pada pariwisata sebagai sumber pendapatan utamanya memerlukan bantuan dari investor asing untuk menyokong pembangunan pariwisata. Keempat, terjadinya standarisasi budaya. Pariwisata seringkali menuntut adanya homogenisasi budaya sesuai dengan selera wisatawan. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat menghilangkan keunikan dan identitas lokal.

Kebijakan Pemerintah dan Peran Masyarakat Lokal

Pemerintah sebagai aktor yang sentral, berperan dalam pelaksanaan pengawasan atau inspeksi dengan memastikan bahwa proyek pariwisata asing memperhatikan nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan aturan mengenai operasional industri pariwisata berbasis modal asing tanpa mengganggu kearifan lokal Bali. Ini termasuk dalam peraturan bangunan,

penggunaan aksara Bali dalam penamaan industri dan sarana pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, dan tata cara yang menghormati kebudayaan setempat. Selanjutnya, diperlukan regulasi yang kuat khususnya bagi proyek pariwisata asing untuk menjaga kepentingan nasional masyarakat lokal, serta hubungan yang seimbang antara investor, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 mengenai Persyaratan Arsitektur Bangunan yang menjelaskan bahwa setiap bangunan, termasuk bangunan infrastruktur pariwisata wajib mengadopsi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kelestarian budaya Bali sebagai elemen penting dalam pariwisata dan identitas lokal melalui pembangunan fisik. Ketentuan tersebut termasuk aturan tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi 15 meter atau setara dengan tinggi pohon kelapa. Selanjutnya, setiap bangunan yang didirikan di Bali harus memperhatikan unsur-unsur arsitektur tradisional Bali sebagai cerminan dari ciri khas budaya Bali. Perda ini juga mengatur mengenai tata cara perizinan pembangunan gedung dan sanksi yang diperoleh apabila pelaku industri pariwisata melanggar ketentuan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pariwisata berbasis investasi asing terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan memastikan kesesuaian proyek dengan aturan lingkungan dan adat. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat adat di Provinsi Bali menetapkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis adat di Bali harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan sumber daya lokal dan memberikan manfaat yang besar bagi *krama* adat atau masyarakat adat. Kebijakan investasi asing dalam mengembangkan pariwisata diharapkan dapat berdampak langsung bagi masyarakat adat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat adat Bali memiliki *awig-awig* atau aturan desa adat dalam pengelolaan industri pariwisata yang terdapat pada desanya didasari oleh tradisi, budaya dan nilai-nilai setempat serta pengelolaannya, desa adat memiliki partisipasi yang penting.

Investor asing perlu memahami adanya konsep pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat desa setempat. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan aktivitas masyarakat setempat untuk mempromosikan pertukaran dan menciptakan komunitas yang memanfaatkan alam,

kebudayaan, sejarah, industri, dan sumber daya lokal lainnya (Natori, 2001 dalam Ikhlās, et.al., 2024). Selain itu, peran masyarakat diperlukan sebagai pemantau, yang artinya masyarakat melakukan pengawasan mengenai proses maupun dampak dari adanya pembangunan pariwisata khususnya yang berbasis investasi asing. Pentingnya keterlibatan masyarakat didasari oleh beberapa hal, yang pertama, sebagai upaya pelestarian nilai dan adat istiadat masyarakat lokal. Kedua, menjadi upaya bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Ketiga, sebagai upaya pertumbuhan ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja yang layak dan memperluas kolaborasi antara UMKM lokal dengan pemilik modal asing yang mendirikan industri pariwisata.

Penting bagi pemangku kebijakan untuk membuat regulasi yang tepat mengenai operasional suatu industri pariwisata, khususnya bagi pariwisata yang berbasis modal asing. Perlunya regulasi yang ketat terkait pelanggaran badan usaha pariwisata oleh WNA untuk memastikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat lokal terhadap banyaknya modal asing yang masuk dalam industri pariwisata Bali. Industri pariwisata yang berdiri atas dasar izin pemerintah juga harus memperhatikan dampak operasional dalam jangka panjang bagi budaya dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, diperlukan pendekatan yang kolaboratif agar semua pihak dapat bertanggung jawab atas keberlanjutan kondisi lingkungan dan kearifan lokal. Pemerintah tidak hanya menjadi aktor utama dalam memberikan legalitas terhadap berdirinya suatu industri pariwisata, tetapi juga berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan dan pemberian sanksi yang tegas selama berjalannya suatu industri pariwisata. Diperlukan sanksi yang ketat terkait pelanggaran prosedur dan operasional industri pariwisata untuk mendorong pariwisata yang berdampak positif bagi masyarakat lokal, bukan hanya sebagai alat penggerak perekonomian, tetapi diperlukan kolaborasi yang efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal dan menjaga kearifan lokal.

E. KESIMPULAN

Sebagai destinasi pariwisata yang terkenal di mancanegara, menjadikan Bali sebagai salah satu pusat investasi bagi modal asing, khususnya dalam industri pariwisata. Investasi asing dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun juga memberikan dampak bagi kearifan lokal.

Dominasi modal asing dapat memberikan ketimpangan ekonomi bagi masyarakat lokal, eksploitasi sumber daya, serta homogenisasi budaya untuk memenuhi standar Barat. Melalui perspektif *new imperialism*, tulisan ini memberikan analisis kritis mengenai operasional industri pariwisata oleh investor asing yang seringkali masih mengabaikan nilai-nilai lokal yang seharusnya dijadikan sebagai acuan. Diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan keselarasan antara perkembangan industri pariwisata dan pelestarian budaya Bali. Partisipasi masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dari dominasi modal asing dalam industri pariwisata, serta mendukung pembangunan pariwisata yang menghormati nilai-nilai tradisional dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. S. (2018). Pariwisata Indonesia Di Masa New Imperialism Atau Imperialism Modern : Sebuah Kritik Dan Refleksi Terhadap Perencanaan Pengembangan Pariwisata Di Borobudur Dan Mandalika. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 5(01), 32–44. <https://doi.org/10.34010/jwk.v5i01.2449>
- Business, C., & Satriyo Untoro. (2018). *Pendaftaran Perusahaan Pma Bali: Syarat Dan Dokumennya*. Retrieved From Incorp Indonesia Website: <https://www.cekindo.com/id/blog/pendaftaran-perusahaan-di-bali#7-proses-pendaftaran-perusahaan-di-bali>
- Higgins-Desbiolles, F. (2022). The Ongoingness Of Imperialism: The Problem Of Tourism Dependency And The Promise Of Radical Equality. *Annals Of Tourism Research*, 94, 103382. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103382>
- <https://facebook.com/balipost>. (2024). Balipost.Com. Retrieved From Balipost.Com Website: <https://www.balipost.com/news/2024/02/17/388251/phri-soroti-oss-sebabkan-pelanggaran...html>
- Muhdany Yusuf Laksono. (2024). *Sektor Hotel Dan Restoran Di Bali Jadi Lokasi Favorit Investor Asing*. Retrieved From Kompas.Com Website: <https://www.kompas.com/properti/read/2024/02/08/133000321/sektor-hotel-dan-restoran-di-bali-jadi-lokasi-favorit-investor-asing>
- Nyoman Budhiana. (2012). Alih Fungsi Lahan Ancam Jalur Hijau. Retrieved From Antara News Bali Website: <https://bali.antaraneWS.com/Berita/23882/Alih-Fungsi-Lahan-Ancam-Jalur-Hijau>
- Pertiwi, V., Surya, A., & Nugraha, W. (2023). *Kerja Sama Dprd Provinsi Bali Dan Dolanesia Singapura Dalam Rangka Pemulihan Pariwisata Bali Pasca*

Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin 10(02).

Retei, J., & Sandi, A. (2021). Aktualisasi Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak Melalui Peran Lembaga Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Dad-Kt). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 08(02).

Rista Rama Dhany. (2024). *Investasi Pariwisata Di Bali Makin Gencar, Perlu Dibatasi?* Retrieved From Detikfinance Website: <https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-7481351/Investasi-Pariwisata-Di-Bali-Makin-Gencar-Perlu-Dibatasi>

Setiawan, E. (2023). Dampak Penutupan Lokalisasi Puger Kulon Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Puger Kabupaten Jember . *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(01).

Sumerti Asih, Nyoman Sri Ratnawati, & I Wayan Wirawan. (2021). Kebijakan Investasi Asing Dalam Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Desa Adat Di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i2.35>

Susilo, J.G.B., Fajar Ramadhan, Dhanang David Aritonang, Harry. (2023). *Investasi Asing Jangan Rugikan Warga Lokal*. Retrieved From Kompas.Id Website: <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/25/investasi-asing-jangan-rugikan-warga-lokal>

Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis Dalam Kasus Eksploitasi Pasir Di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994>

Widiyatmoko. (2023). *Antara Overtourism, Mass Tourism Dan Touristification*. Retrieved From Kompasiana Website: https://www.kompasiana.com/kokpit/64154275d734ba4a4957c6e2/dampak?Page=All&Page_Images=2

Wiratmini, N. P. E. (2021). *Asing Dominasi Investasi Pariwisata Di Bali*. Retrieved From Bisnis.Com Website: <https://bali.bisnis.com/read/20210322/561/1370829/asing-dominasi-investasi-pariwisata-di-bali>

Yuko, K. (2024). *Cerita Alih Fungsi Lahan Hijau Di Bali Tak Pernah Usai*. Retrieved From Balebengong Website: <https://balebengong.id/cerita-alih-fungsi-lahan-hijau-di-bali-tak-pernah-usai/>



Definisi Konseptual *E-Government* dan *E-Governance* : Analisis Komparatif

Erinda Alfiani Fauzi¹, Nike Purnamawati²
Universitas Palangka Raya¹, Universitas Lambung Mangkurat²
E-mail: erindafauzi@fisip.upr.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Keywords: <i>e-government,</i> <i>e-governance,</i> <i>conceptual definition</i></p> <p>Received 15/06/2025 Accepted 19/06/2025 Available online 30/06/2025</p>	<p><i>This research examines the conceptual distinctions between e-government and e-governance through comprehensive literature analysis. Although these terms are often used interchangeably, there are fundamental differences in their conceptual foundations, scope, and practical implications. The findings reveal that e-government tends to focus on technical and administrative aspects of technology implementation in government, while e-governance encompasses a broader perspective on the transformation of relationships between government, citizens, and other stakeholders. This research proposes an integrated conceptual framework that positions both concepts along a continuum of digital government development. The findings provide necessary conceptual clarification for theoretical development and practical implementation in the field of digital public administration, while encouraging a more holistic approach to understanding digital government transformation.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, transformasi penyelenggaraan pemerintahan melalui integrasi teknologi informasi telah menjadi kebutuhan di seluruh dunia. Konsep *e-government* dan *e-governance* hadir sebagai wujud modernisasi dalam proses birokrasi pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintahan. Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal cakupan, pendekatan, dan implementasi.

E-government pada umumnya mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional

pemerintahan(Palvia & Sharma, 2007). Sementara itu, *e-governance* memiliki dimensi yang lebih luas dengan melibatkan interaksi antara pemerintah, warga negara, dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan(Dawes, 2008). Analisis perbandingan terhadap kedua konsep ini penting untuk memahami bagaimana teknologi digital tidak hanya mengubah mekanisme penyampaian sektor pelayanan publik, tetapi juga mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemberian hak dasar kepada masyarakat.

Penelitian ini akan mengkaji perbedaan konseptual antara *e-government* dan *e-governance* melalui tinjauan literatur dan indikator masing-masing subjek(Bannister & Connolly, 2012; United Nations, 2020). Pemahaman mendalam mengenai perbedaan ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan kebijakan, implementasi sistem pemerintahan elektronik bahkan untuk mempermudah pengambilan indikator yang relevan untuk mengkaji kedua subjek yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *literature review* sebagai metode utama untuk mengidentifikasi, mengkaji secara kritis, serta menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan topik yang menjadi fokus kajian. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa literature review mampu memberikan landasan teoritis yang kuat serta pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan keilmuan di bidang yang diteliti (Snyder, 2019). penggunaan metode ini diharapkan dapat memperkaya analisis konseptual dan memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengembangan teori maupun praktik dalam bidang kajian yang dibahas.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Definisi Konseptual *E-government*

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Maka berikut definisi konseptual dari literature review penelitian terdahulu. Menurut World Bank (2015), *e-government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk

mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya.

Selanjutnya menurut UNDP (2012) mendefinisikan *e-government* sebagai aplikasi TIK oleh lembaga pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja, mendorong transparansi, dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Defini konseptual dari penelitian Ndou (2004) menyatakan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, karyawan, dan entitas pemerintah lainnya.

Definisi konseptual didukung dengan beberapa indikator-indikator yang digunakan dalam implementasi pelaksanaan *e-government*. Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Layne & Lee (2001), indikator perkembangan *e-government* meliputi:

1. ketersediaan dan aksesibilitas informasi secara online
2. kemampuan yang dimiliki dalam melakukan interaksi elektronik
3. Integrasi vertikal yang menghubungkan berbagai tingkatan pemerintahan
4. Integrasi horizontal yang menghubungkan antar tingkatan pemerintah

E-government yang efektif dan efisien memerlukan keseimbangan antara pengelolaan teknologi, proses administratif, dan kebijakan publik dengan Indikator sebagai berikut yang dijelaskan oleh Dawes (2008) :

1. Kualitas kebijakan
2. kerangka hukum
3. Efektivitas struktur manajemen
4. Desain sistem informasi
5. Standarisasi Sistem
6. Mekanisme koordinasi antar lembaga
7. Nilai dalam penggunaan teknologi

Maka untuk optimalisasi proses implementasi E-Government maka diperlukan konsep *open government* yang kuat. konsep *open government* ini melampaui batasan tradisional *e-government* dengan menitikberatkan pada keterbukaan proses pemerintahan, perluasan akses terhadap informasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan (Meijer et al., 2012).

Adapun indikator *open government* dalam e-government menurut Meijer et al. (2012) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat keterbukaan data dan informasi
2. Mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan
3. Platform kolaborasi antara pemerintah, warga, dan sektor privat
4. Budaya organisasi yang mendukung keterbukaan.

2. Definisi Konseptual *E-governance*

E-governance memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan e-government. E-governance mencakup interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penggunaan TIK untuk memfasilitasi partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan. Maka berikut definisi konseptual dari literature review penelitian terdahulu. UNESCO (2011) mendefinisikan e-governance sebagai "penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh berbagai aktor dalam masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan untuk mempromosikan tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif dan kolaboratif."

Menurut Palvia & Sharma (2007) *e-governance* adalah konsep yang lebih luas dan mencakup keseluruhan tata kelola termasuk *e-democracy*, *e-voting*, dan partisipasi publik online untuk memfasilitasi proses tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Selanjutnya menurut Dawes (2008) melihat *e-governance* sebagai penggunaan strategis TIK untuk mentransformasi cara warga negara berpartisipasi dalam demokrasi dan mengubah relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa indikator yang mendukung definisi konseptual tentang *e-governance* diatas adalah *e-governance* menurut Pereira et al. (2018) konsep *smart governance yang termasuk didalamnya pengembangan e-governance* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data. Mereka mengidentifikasi beberapa indikator utama dalam penerapan *smart governance*, yaitu:

1. pengambilan keputusan berbasis data dan bukti
2. kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan

3. transformasi internal berbasis TIK
4. partisipasi warga dan penerapan prinsip pemerintahan terbuka
5. promosi kreativitas, kewirausahaan, serta penguatan kesetaraan sosial
6. integrasi prinsip keberlanjutan dan ketahanan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

Selanjutnya indikator yang mendukung definisi konseptual tentang *e-governance*, Indikator yang diidentifikasi Gil-García dan Pardo (2005) meliputi:

1. Kualitas infrastruktur teknologi
2. Kesesuaian dengan struktur organisasi
3. Dukungan politik dan regulasi
4. Kesiapan sumber daya manusia
5. Keselarasan dengan konteks sosial-ekonomi

3. Analisis Komparatif antara *E-Government* dan *E-Governance*

E-Government secara konseptual didasarkan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan publik. Sedangkan, *E-Governance* memiliki konsep yang lebih luas yang mencakup transformasi relasi kekuasaan dan partisipasi dalam proses tata kelola. Konsep ini lebih menekankan pada dimensi sosio-politik dari penggunaan TIK dalam pemerintahan. Untuk menjelaskan analisis komparatif dari definisi konseptual antara *e-government* dan *e-governance* :

Tabel 1. analisis komparatif dari definisi konseptual antara *e-government* dan *e-governance*

Dimensi	E-Government	E-Governance
Definisi	Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan publik	<i>Meningkatkan partisipasi dan membantu proses tata kelola pemerintah yang inklusif</i>
Fokus dan Tujuan	Berfokus pada aspek teknis dan administratif dari digitalisasi pemerintahan	Berfokus pada transformasi relasi kekuasaan dan partisipasi dalam proses tata kelola
Cakupan	Sempit dan spesifik: aplikasi teknologi dalam proses administratif dan penyediaan layanan publik	Luas: mencakup seluruh ekosistem tata kelola termasuk e-democracy, e-voting, dan partisipasi publik

Dimensi	E-Government	E-Governance
Media	Formal dan terstruktur: portal layanan online, sistem administrasi elektronik, database terintegrasi	Beragam dan dinamis: forum diskusi, platform konsultasi publik, e-voting, mekanisme umpan balik warga
Prioritas Kebijakan	Fokus pada infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas SDM, standardisasi, integrasi sistem	Pendekatan holistik: teknologi, reformasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perubahan budaya organisasi
Indikator Utama	Efisiensi, efektivitas, transparansi dalam operasi pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan	Partisipasi, inklusivitas, kolaborasi, dan pemberdayaan warga
Hambatan Implementasi	Teknis dan administratif: infrastruktur TIK, interoperabilitas, keamanan data, literasi digital	Sosial dan politik: partisipasi inklusif, kesenjangan partisipasi digital, kepercayaan publik, dampak partisipasi
Tingkat Keberhasilan	Efisiensi proses, penghematan biaya, tingkat penggunaan layanan, kepuasan pengguna	Tingkat partisipasi warga, inklusivitas, dampak pada kebijakan, kepercayaan pada pemerintah

Sumber : Diolah Penulis, 2025

D. KESIMPULAN

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun *e-government* dan *e-governance* saling terkait, keduanya memiliki perbedaan konseptual yang signifikan dalam hal definisi, fokus, tujuan, cakupan, media prioritas kebijakan, indikator utama, hambatan implementasi serta tingkat keberhasilan masing-masing subjek. *E-government* lebih berfokus pada aspek teknis dan administratif dari digitalisasi pemerintahan, sementara *e-governance* mencakup transformasi yang lebih luas dalam proses tata kelola dan relasi antara pemerintah dan masyarakat. Maka perbedaan konseptual ini penting untuk pengembangan strategi digital yang efektif dalam sektor publik yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokratis dan tata kelola yang baik. Pendekatan yang paling efektif mungkin adalah yang mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua konsep ini untuk mencapai transformasi digital yang komprehensif dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Penelitian

- Bannister, F., & Connolly, R. (2012). Defining e-governance. *E-Service Journal*, 8(2), 3–25.
- Dawes, S. S. (2008). The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance. *Public Administration Review*, 68(s1). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00981.x>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/s0740-624x\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/s0740-624x(01)00066-1)
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29.
- Ndou, V. (2004). E-government for developing countries: Opportunities and challenges. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18, 1–24.
- Palvia, S. C. J., & Sharma, S. S. (2007). E-government and e-governance: Definitions/domain framework and status around the world. In *International Conference on E-governance* (pp. 1–12).
- Pereira, G. V, Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. *Information Polity*, 23(2), 143–162.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- United Nations. (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. *United Nations Department of Economic and Social Affairs*.



Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Tabore Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas)

Yoga¹, Imanuel Jaya², Edward Melio Bertho³
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya^{1,2,3}
Email: jayasuhin@fisip.upr.ac.id, Edward.mb@fisip.upr.ac.id

Article Info

Keywords:
Village Consultative Body, Supervisory Function, Village Governance, Village Regulations, APBDes, Transparency.

*Received 17/06/2025
Accepted 19/06/2025
Available online 30/06/2025*

Abstract

The supervisory role of the Village Consultative Body (BPD) is essential in fostering transparent, accountable, and participatory village governance. As a representative institution of the village community, the BPD monitors government administration, including financial management and the implementation of public policies. This study specifically examines how the BPD carries out its supervisory function in Tabore Village, Mantangai Subdistrict, Kapuas Regency, using a qualitative approach and a descriptive case study method through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review. The analysis applies the theory of Juliantara (2005, as cited in Ngga, 2022), which outlines three key areas of BPD supervision: (1) the supervision of village regulations, (2) the supervision of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), and (3) the supervision of decisions made by the Village Head. The findings indicate that the BPD of Tabore Village has implemented these three supervisory functions effectively and has actively involved the community in village deliberations as a form of transparency and accountability. Nevertheless, the overall effectiveness of the BPD's oversight still faces several challenges. These include the need for stronger institutional capacity, improved quality of community participation, and enhanced synergy between the BPD and the Village Government. Strengthening these aspects is crucial for achieving more responsive, inclusive, and effective village governance.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat relevan dalam konteks otonomi desa yang semakin berkembang. BPD, sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa, memiliki peran penting dalam mengawal pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat(Hutapea & Karawaheny, 2022). Fungsi pengawasan oleh BPD bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala desa sejalan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan nuansa yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat(Ulzikri, 2020). Mencermati hal tersebut maka di butuhkan anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemisahan posisi Kepala Desa beserta perangkatnya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memungkinkan Pemerintahan Desa lebih efektif dalam melaksanakan Otonomi Desa selain kewajiban dari supra desa. Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain itu, pemisahan semacam itu bertujuan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi perbedaan antara perancang kebijakan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelaksana kebijakan yaitu Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Kebijakan desa diawali dengan disusunnya Peraturan Desa (PERDES), yang dimulai dari tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan (Mulyono 2014:411). Disinilah fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa berjalan maksimal, BPD sebagai perancang diharapkan mampu untuk mengarahkan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam konsep kebijakan, yaitu Peraturan Desa (PERDES) dalam upaya terwujudnya Otonomi Desa.

Di Desa Tabore, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami beberapa kendala yang menghambat optimalisasi peran BPD dalam pemerintahan desa. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mengurangi kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Ketidakadaan fasilitas yang memadai, seperti kantor khusus untuk BPD, menjadi penghambat bagi BPD untuk melaksanakan kegiatan secara rutin, termasuk dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat. Akibatnya, BPD kurang aktif dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, sehingga kesempatan untuk mendengarkan secara langsung keluhan maupun keinginan masyarakat menjadi terbatas. Hal ini berakibat pada rendahnya inisiatif BPD untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan melakukan pertemuan guna mendekatkan diri dengan warga desa. Kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemerintahan desa, seperti pertemuan untuk membahas peraturan desa. Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPD belum optimal dalam melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap tiga aspek utama pengawasan terhadap peraturan desa, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Potret pengawasan BPD terhadap peraturan desa menunjukkan bahwa masih banyak regulasi yang disahkan tanpa kajian mendalam atau konsultasi yang melibatkan masyarakat luas. BPD kurang aktif dalam mengevaluasi implementasi regulasi

tersebut di lapangan dan cenderung bersikap pasif terhadap potensi pelanggaran aturan oleh pemerintah desa. Dalam aspek pengawasan keuangan desa, BPD belum maksimal dalam memantau alokasi dan penggunaan anggaran, baik karena keterbatasan akses terhadap dokumen keuangan maupun karena kurangnya pemahaman teknis anggota BPD terhadap pengelolaan APBDes. Hal ini menyebabkan rendahnya daya kontrol terhadap potensi penyimpangan anggaran. Sementara itu, dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa, BPD masih menghadapi tantangan dalam melakukan evaluasi yang objektif dan berkala. Tidak adanya indikator kinerja yang disepakati bersama, minimnya laporan kegiatan yang transparan, serta kurangnya kerja sama antaranggota BPD dalam pembagian tugas pengawasan menjadi penyebab utama lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala desa. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan pengawasan tidak terstruktur dengan baik dan menjadi kurang efektif dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengetahui secara mendalam terkait fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tabore. Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis keadaan/kejadian yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik dan mendalam.

Pada penelitian ini peneliti data yang diperoleh bersumber data data primer dan juga data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, *in depth-interview* (wawancara mendalam), dan juga dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh akan dilakukan analisis guna mempermudah untuk mempelajari, memahami dan menarik kesimpulan. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan tahapan mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Tabore menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tabore telah menjalankan pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Pelaksanaan peraturan desa mengacu pada SOP dan peraturan yang berlaku,

termasuk UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD Tabore berperan baik dalam mengawasi anggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan transparansi melalui berbagai media. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar pelayanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga sesuai dengan teori Juliantara (2005), yang mengemukakan bahwa pengawasan mencakup pelaksanaan peraturan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Pelaksanaan pengawasan BPD Tabore terhadap APBDes menunjukkan bahwa transparansi anggaran telah dijaga dengan berbagai langkah, termasuk musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dan publikasi rincian penggunaan dana melalui media. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan akuntabilitas anggaran, termasuk audit berkala dan evaluasi terbuka. BPD selalu memantau peraturan desa dan memberikan teguran atau arahan untuk menyelesaikan penyimpangan, melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengawasan.

BPD Tabore menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Kepala Desa dengan melibatkan mekanisme rapat evaluasi berkala, menerima aspirasi masyarakat, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Transparansi dijaga dengan mempublikasikan informasi melalui papan informasi desa, media sosial, dan forum diskusi. Pengawasan ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPD Tabore memiliki peran yang baik dalam mengawasi anggaran dan memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Masyarakat Desa Tabore juga diberikan akses informasi yang jelas melalui berbagai media, yang mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan yang terus ditingkatkan. Evaluasi berkala terhadap prosedur pelayanan perlu dilakukan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Tabore.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tabore, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, bahwa pengawasan dilakukan dalam tiga aspek. Pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa menunjukkan pelayanan yang transparan dan akuntabel sesuai SOP dan UU No. 6 Tahun 2014. Kedua,

pengawasan APBDes memastikan transparansi anggaran melalui musyawarah desa dan publikasi rincian anggaran di berbagai media. Ketiga, pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa dilakukan dengan rapat evaluasi, penerimaan aspirasi, dan publikasi informasi untuk menjaga kesesuaian kebijakan dengan peraturan dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswel, John W.(2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Dwiyanto.(2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Juliantara, D. (2005). *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Hutapea, C., & Karawaheny, M. (2022). Desa : Transparansi Keuangan Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Otonom (Studi : Pembangunan Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020). *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 09(03), 478–492.
- Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994>
- UU No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.



Dampak Penyelenggaraan KTT *Archipelagic and Island States* Forum 2023 Terhadap Pariwisata di Bali

Ida Ayu Devina Radharani Adinatha¹, Ni Wayan Rainy Priadarsini²

Universitas Udayana

Email: adinatha.2212521069@student.unud.ac.id

Article Info

Keywords:

AIS Forum, Bali, Tourism, Sustainable, Blue Economy

Received 05/12/2024

Accepted 19/06/2025

Available online 30/06/2024

Abstract

This study aims to measure the impact of the 2023 Archipelagic and Island States (AIS) Forum Summit on Bali's tourism sector. Employing a qualitative approach, this research analyzes both primary and secondary data to identify significant changes occurring after the summit. The findings reveal that the AIS Forum made a substantial positive contribution to Bali's economic growth, particularly in the tourism sector. Notably, increased hotel occupancy rates, a surge in tourist arrivals, and local economic growth were observed as direct impacts. Furthermore, the summit played a crucial role in promoting Bali as a sustainable tourism destination, with a particular focus on marine tourism through the concept of the blue economy.

A. PENDAHULUAN

Sektor Pariwisata telah lama menjadi salah satu pilar utama pembangunan perekonomian suatu negara karena dalam industri ini setiap negara berlomba-lomba dalam mempromosikan sektor pariwisatanya, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia, khususnya melalui peran Pulau Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, dengan keindahan alamnya yang memikat, kekayaan budaya, dan keramahan penduduk lokal, telah menarik jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Namun, Bali bukan hanya sekedar tempat wisata, melainkan menjadi kekuatan Indonesia (*Soft Power*) seperti, keindahan lanskapnya, keanekaragaman budayanya, serta infrastruktur kelas dunia yang dimilikinya membuat Bali ideal dalam menyelenggarakan event-event internasional yang berskala besar. Di balik keindahan alamnya, Bali juga menawarkan banyak hal lain yang tidak hanya menarik dari sisi pariwisata, tetapi juga dari perspektif geopolitik dan diplomasi. Sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Asia Tenggara, Bali

memainkan peran sentral dalam mempromosikan citra Indonesia di ranah internasional.

Salah satu konferensi internasional yang telah terlaksana di Bali yakni, Konferensi Tingkat Tinggi *Archipelagic and Island State Forum* atau KTT AIS. Forum ini sangat berarti bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dibalik terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah laut yang luas terdapat perjuangan diplomasi yang tidak akan pernah terlupakan, yakni Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut terus diperjuangkan oleh Dr. Hasyim Djalal dan Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, sehingga diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau *United Nation Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 (Kemenhub, 2023). Dengan status negara kepulauan, wilayah Indonesia tidak hanya lagi sebatas daratan tetapi juga meliputi luas lautan di antara pulau di seluruh Nusantara (Ulzikri, 2023). Forum ini merupakan wadah kerjasama antara negara-negara pulau dan kepulauan yang bertujuan untuk mengatasi masalah global, khususnya dalam pembangunan kelautan. Terdapat 51 negara pulau dan kepulauan yang tergabung pada forum ini sebagai anggota aktif. KTT AIS dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 10-11 Oktober 2023 dengan tema "*Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future*". Dengan mengusung tema tersebut, KTT AIS diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi bagi negara pulau dan kepulauan dalam membangun kehidupan masyarakat yang berprinsip pada kelestarian dan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, hal yang menjadi prioritas utama adalah ancaman terhadap perubahan iklim yang dapat berdampak pada ekosistem laut dan penduduk negara-negara anggota.

KTT AIS dihadiri oleh 29 negara anggota dan organisasi internasional seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG), *Pacific Island Forum* (PIF), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan *United Nations Development Programme* (UNDP) (Kemenparekraf/Baparekraf, 2023). Sebagai tuan rumah, menjadi suatu kehormatan dan peluang yang sangat baik bagi Indonesia dalam memimpin diskusi mengenai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara pulau dan kepulauan, termasuk isu-isu terkait perubahan iklim, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan dan pariwisata berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pemimpin dalam forum ini. Indonesia berperan aktif sebagai inisiator dalam upaya menangani isu-isu global

terkait kelautan. Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan memperkuat pandangan negara-negara dunia bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap isu-isu ini, tetapi juga menyediakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan kolaborasi internasional.

KTT AIS membuka potensi peningkatan ekonomi, khususnya di bidang pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya. Kunjungan para delegasi, perwakilan internasional, serta media internasional berkontribusi langsung terhadap meningkatnya angka wisatawan dan okupansi hotel. Hal ini meningkatkan pengeluaran di sektor-sektor seperti perhotelan, transportasi, serta memberikan eksposur media yang memperkuat citra Bali maupun Indonesia sebagai destinasi pariwisata. Dampak tersebut membentuk efek berantai positif yang menguatkan posisi Pulau Bali sebagai destinasi unggulan dalam persaingan pariwisata global. Kehadiran delegasi asing di Pulau ini turut membuka kesempatan strategis dalam memperkenalkan destinasi pariwisata Bali ke pasar internasional, yang berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal khususnya dalam sektor pariwisata. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengangkat rumusan masalah “Bagaimana dampak penyelenggaraan KTT *Archipelagic and Island States* Forum 2023 terhadap pariwisata di Bali?”. Sehingga, tulisan ini akan memberikan analisis lebih dalam mengenai dampak penyelenggaraan KTT *Archipelagic and Island States* Forum 2023 terhadap perkembangan sektor pariwisata di Bali.

B. LITERATURE REVIEW

Dalam menganalisis isu yang diangkat, penulis menggunakan beberapa artikel jurnal yang relevan. Salah satu sumber penting berasal dari tulisan Fitra Deni dan Pian Sopian (2017) dalam artikel berjudul “*Peran ASEAN Tourism Forum dalam Meningkatkan Pariwisata Indonesia Periode 2011-2015.*” Artikel ini menunjukkan bahwa peran ASEAN sangat strategis dalam meningkatkan sektor pariwisata di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Program seperti *ASEAN Tourism Strategic Plan* (ATSP) dan *Travel Exchange* disebut sebagai langkah penting dalam mendorong standar internasional pariwisata negara anggota, termasuk Indonesia sebagai destinasi unggulan. Selanjutnya, referensi kedua yakni artikel oleh Ariyanti (2023) yang berjudul “*Dampak Presidensi G20 sebagai Forum Internasional dalam Kebijakan Perekonomian Masyarakat Bali.*” Penelitian tersebut membahas bagaimana pelaksanaan G20 di Bali pada tahun 2022 dapat mendorong pemulihan

ekonomi melalui eksposur global yang diterima oleh Bali. Sebagai lokasi perhelatan G20, Bali mendapat sorotan internasional, baik dari segi diplomasi, ekonomi, maupun pariwisata. Efek jangka pendek dan panjang terhadap perekonomian lokal pun dikaji dalam penelitian tersebut.

Kedua artikel ini memiliki relevansi dengan fokus penelitian artikel jurnal ini. Khususnya artikel kedua oleh Ariyanti, karena sama-sama menyoroti dampak dari pelaksanaan forum internasional di Bali. Meskipun konteksnya berbeda G20 dan AIS Forum keduanya memberikan gambaran bagaimana sebuah konferensi global dapat memengaruhi dinamika sektor pariwisata. Penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih spesifik pada dampak langsung dari AIS Forum 2023 terhadap sektor pariwisata Bali, menjadikannya pelengkap terhadap penelitian yang telah ada.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data secara riset. Data yang digunakan berupa data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk artikel jurnal, publikasi ilmiah, situs resmi pemerintah, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi literatur digunakan sebagai dasar untuk memahami konteks teoretis dan empiris mengenai pariwisata berkelanjutan serta peran forum internasional dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta untuk memperoleh data tanpa perlu terjun langsung ke lapangan dan juga berupa data primer dengan melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam terkait dengan isu yang dibahas.

D. HASIL DAN DISKUSI

KTT AIS Forum 2023

Archipelagic and Island States (AIS) Forum merupakan inisiatif kerja sama global yang diinisiasi oleh Indonesia untuk memperkuat solidaritas negara-negara pulau dan kepulauan dalam menghadapi tantangan bersama, terdiri atas 51 Negara Pulau dan Kepulauan yakni, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Barbados, Belize, Cabo Verde, Kepulauan Cook, Komoro, Kuba, Siprus, Dominika, Republik

Dominika, Fiji, Negara Federasi Mikronesia, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Islandia, Indonesia, Irlandia, Jamaika, Jepang, Kiribati, Madagaskar, Maladewa, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Nauru, Niue, Selandia Baru, Palau, Papua Nugini, Filipina, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Samoa, Sao Tome dan Principe, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Suriname, Timor-Leste, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, Tonga, Inggris Raya, dan Vanuatu. Sebagai inisiatif strategis Indonesia, AIS Forum telah berhasil menyatukan 51 negara pulau dan kepulauan dalam sebuah jaringan kerja sama yang kuat. Dibentuk pada tahun 2018 dengan dukungan *United Nations Development Programme* (UNDP), forum ini telah menjadi platform utama bagi negara-negara kepulauan untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan global, termasuk perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya laut. Forum ini berupaya aktif dalam mengatasi tantangan global melalui kolaborasi internasional, dengan mengupayakan pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pengembangan *blue economy* yang berkelanjutan, pengelolaan sampah laut yang efektif, dan penerapan tata kelola maritim yang baik. Dengan fokus pada sektor-sektor seperti pariwisata, energi terbarukan, akuakultur, dan industri kelautan, AIS Forum mendorong pemanfaatan potensi ekonomi secara berkelanjutan. Sejak awal, AIS Forum telah menunjukkan komitmennya untuk mendorong aksi nyata melalui penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi tahunan.

Bagi negara-negara anggota AIS Forum yang negara pulau dan kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan atau perairan, *blue economy* menjadi landasan strategis untuk mengembangkan sektor pariwisata bahari secara berkelanjutan. *Blue economy* merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi ekosistem laut. Dengan memanfaatkan kekayaan alam seperti terumbu karang, pantai, dan ekosistem laut lainnya, *marine tourism* dapat dikembangkan melalui praktik ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pelestarian biodiversitas laut. Hampir 50% dari 51 negara-negara pulau dan kepulauan yang berpartisipasi di AIS Forum 2023 menjadikan pariwisata sebagai sektor kontribusi besar terhadap ekonomi. Maka konsep pariwisata berkelanjutan menjadi kunci yang strategis (Sandiaga Uno, 2023). Fokus ini tidak hanya menjaga daya tarik wisata

tetapi juga memastikan perlindungan ekosistem laut, meningkatkan ekonomi lokal, dan menciptakan pengalaman wisata yang edukatif dan berkelanjutan.

Indonesia menjadi *host* KTT AIS Forum 2023 yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) Badung, Bali pada 11 Oktober 2023 dengan mengusung tema “*Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future*”. Indonesia telah memanfaatkan keunggulan Bali sebagai tuan rumah berbagai pertemuan internasional, menjadikan pulau ini bukan hanya ikon pariwisata, tetapi juga simbol diplomasi yang strategis, Dr. Deria Adi Wijaya, S.ST.Par., M.Sc. selaku Pakar Pariwisata Universitas Sebelas Maret (UNS) menjelaskan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi acara tingkat seperti KTT didasarkan pada analisis terhadap empat faktor utama yaitu, *Amenities, Attraction, Accessibility, dan Ancillary* yang sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bali memiliki fasilitas penunjang yang memadai, sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan acara berskala internasional. Keputusan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi KTT seperti, KTT AIS Forum 2023, tetapi juga memperkuat posisi Bali maupun Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.

Deklarasi yang dihasilkan dari KTT AIS Forum 2023 menegaskan bersama negara pulau dan kepulauan, termasuk Indonesia untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin rentan terjadi. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memimpin upaya global dalam melestarikan ekosistem laut yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya *Sustainable Development Goals (SDG's)* ke-8 dan ke-14, dan merupakan langkah nyata dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai keputusan penting mengenai sektor pariwisata sebagai komponen dari *blue economy* dihasilkan dalam forum ini, dengan Indonesia memainkan peran utama dalam menekankan pendekatan pembangunan berkelanjutan sebagai strategi utama. “*Hampir 50 persen dari 51 negara-negara pulau dan kepulauan yang berpartisipasi di AIS Forum 2023 menjadikan pariwisata sebagai sektor dengan kontribusi besar terhadap ekonomi. Maka konsep pariwisata berkelanjutan menjadi kunci yang sangat strategis*”, kata mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Uno (2023). Selain itu, Indonesia menyuguhkan ragam budaya Tanah Air dalam gelaran

KTT AIS Forum 2023 melalui program ‘*Cultural Experience*’, yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Theater, Bali, Rabu (11/10/2023). Dengan adanya program *Cultural Experience*, mampu menjadi kesempatan bagi Indonesia mempromosikan keragaman serta kekayaannya dalam sektor pariwisata ke kancah internasional. Forum ini juga diharapkan dapat mewujudkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor yang dituju salah satunya pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di negara ini. Forum ini tidak hanya meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi baru di sektor pariwisata. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan selama forum, Indonesia berhasil memperkenalkan keanekaragaman budaya, keindahan alam, dan keramahan masyarakatnya kepada para delegasi dari berbagai negara. Selain itu, melalui KTT ini, Indonesia telah berhasil memperkuat kolaborasi dengan negara-negara pulau dan kepulauan lainnya dalam mengembangkan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Hasil dari kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan lingkungan alam.

Dampak KTT AIS Forum 2023 Terhadap Pariwisata di Bali

Berdasarkan rencana *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia menuju 2030, sektor pariwisata, khususnya kedatangan wisatawan mancanegara, telah lama diakui sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan ke-8 SDGs yaitu, *Decent Work and Economic Growth* yang menekankan pada terciptanya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan negara melalui devisa, serta pembukaan lapangan kerja Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum 2023 di Bali merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata global yang menarik. Acara berskala internasional ini tidak hanya menjadi ajang diplomasi yang penting, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata yang efektif. Dengan mengundang para delegasi dari berbagai negara pulau dan kepulauan, KTT AIS Forum telah berhasil

menempatkan Bali di peta pariwisata dunia dan memperluas jaringan pasar potensial.

Pemilihan Bali sebagai tuan rumah KTT AIS Forum 2023 sejalan dengan upaya pemerintah dalam diversifikasi pasar wisata. Dengan menargetkan segmen wisatawan *Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) yang memiliki daya beli tinggi, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang potensial dan populer sebagai *Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE). Pulau ini telah menduduki jajaran peringkat teratas dalam destinasi MICE di Indonesia sejak 2010, dengan begitu Bali sering kali didaulat sebagai tuan rumah berbagai *event* bertaraf Internasional. Selain itu, KTT AIS juga dapat berkontribusi dalam memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata berkualitas yang mampu menyelenggarakan event internasional berskala besar. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia melalui penguatan citra dan diversifikasi pemasaran.

Penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 memberikan dampak positif bagi pariwisata Bali. Pertama, meningkatkan tingkat hunian kamar hotel khususnya di kawasan Nusa Dua hingga mencapai 90 persen. Kedua, menjadi media promosi secara tidak langsung bagi Bali untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pelayun pada Selasa, 10 Oktober 2023. Saat KTT AIS Forum 2023 berlangsung okupansi kamar hotel di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali yang biasanya berkisar 80%, melonjak hingga mencapai 90%, naik sekitar 10% dari rata-rata sebelumnya, salah satu faktor penyebabnya merupakan delegasi AIS Forum dan juga wisatawan lainnya. Dengan begitu membuktikan lagi bahwa reputasi Bali sebagai tempat MICE yang aman dan nyaman. Berlangsungnya acara ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seperti yang disampaikan oleh mantan Menparekraf/Kabaparekraf, Sandiaga Uno, acara ini tidak hanya meningkatkan okupansi hotel dan restoran, namun juga mendorong peningkatan konsumsi produk-produk lokal. Salah satu contohnya, transaksi pembelian lukisan senilai 15 ribu dolar AS oleh seorang pejabat tinggi dari Papua Nugini terhadap karya seniman Bali menunjukkan tingginya daya beli para delegasi dan potensi besar pasar seni rupa lokal. Hal ini mengindikasikan

bahwa KTT AIS Forum 2023 telah berhasil menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Bali dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM.

Forum ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan para pemimpin negara pulau dan kepulauan, namun juga menjadi sarana strategis dalam menjaring investasi terutama untuk inisiatif pariwisata berkelanjutan. Melalui berbagai *side event* yang digelar, para investor dari berbagai negara telah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai potensi investasi di Indonesia, terutama di sektor pariwisata. Investasi yang ditargetkan diperkirakan mencapai antara 6 hingga 8 miliar dolar AS yang mana secara global, investasi yang dibutuhkan dalam menunjang pariwisata berkelanjutan sekitar 100 miliar dolar AS, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai destinasi investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis di sektor pariwisata global. Selain itu, forum ini juga telah memperkuat komitmen Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan sejalan dengan tujuan global untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Adopsi Program *Blue Economy* AIS Forum terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali

Pariwisata berkelanjutan merujuk pada konsep pengelolaan wisata yang memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan tujuan menciptakan manfaat berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung (Menparekraf/Baparekraf RI, 2021). Dengan mengadopsi prinsip-prinsip SDGs, pariwisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri pariwisata, masyarakat lokal, hingga wisatawan, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Melalui pariwisata berkelanjutan, kita dapat menciptakan destinasi wisata yang menarik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua. Daya tarik Pulau Bali, yang terdiri dari keindahan alam dan kekayaan budaya lokal, telah menjadi magnet wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Sektor pariwisata telah menjadi tulang punggung perekonomian Bali, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini. Pulau Bali dikembangkan sebagai destinasi wisata yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana*, menekankan hubungan harmonis antara

manusia, alam, dan Tuhan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *Tri Hita Karana*, hal ini tidak hanya mampu menarik wisatawan yang mencari pengalaman wisata yang autentik, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada KTT AIS Forum 2023 telah berhasil meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia yang memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. Melalui AIS Forum, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan model pariwisata yang berkelanjutan dengan pendekatan *blue economy* sebagai strategi utama, yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Selain itu, forum ini juga telah memperkuat jejaring kerja sama dengan negara-negara pulau dan kepulauan lainnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga kelestarian lautan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil peran kepemimpinan dalam isu-isu global yang berkaitan dengan pariwisata dan lingkungan. Bali, sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, telah mengambil langkah strategis untuk mengembangkan *blue economy* yang berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif, Pemerintah Provinsi Bali berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya laut sambil menjaga kelestarian ekosistem laut. Untuk memastikan keberlanjutan pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk melakukan diversifikasi pada destinasi wisata ucap Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya (2024).

Diversifikasi wisata diarahkan pada pengembangan destinasi berbasis kelautan seperti wisata bahari (*marine tourism*), ekowisata, dan kawasan mangrove, guna mengurangi tekanan pada destinasi konvensional. Diversifikasi ini tidak hanya akan mengurangi tekanan pada destinasi wisata yang sudah ada, tetapi juga akan membuka akses bagi masyarakat di daerah yang kurang berkembang untuk mendapatkan manfaat dari sektor pariwisata, tetapi akan tetap mengurangi risiko pariwisata berlebihan di tempat-tempat wisata yang lebih tradisional. “Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, organisasi internasional, dan komunitas lokal dan juga media. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan pariwisata Bali yang lebih resilient dan adaptif terhadap berbagai tantangan global” mengutip dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pelayun (2024).

Contoh penerapan konkret prinsip pariwisata berkelanjutan terlihat di Desa Les, Buleleng, Bali, yang menjadi pionir dalam pelestarian ekosistem laut melalui

partisipasi komunitas. Diinisiasikan oleh anggota Kaoem Telapak yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan aktif dalam melakukan pemantauan, pembinaan, dan dorongan terhadap kebijakan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum menuju pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Gede Yudarta ialah anggota Kaoem Telapak yang merintis usaha pariwisata berkelanjutan di Desa Les dimulai pada akhir tahun 90-an, pariwisata pada desa ini belum populer dan sebagian besar warganya mencari nafkah sebagai nelayan, cara penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat adalah dengan menggunakan racun sianida sehingga hampir 75% terumbu karang di Desa Les rusak. Sejak awal tahun 2000-an, Gede Yudarta bersama lembaga lokal (Yayasan Bahtera Nusantara) mulai mengedukasi masyarakat setempat untuk beralih ke praktik wisata bahari yang ramah lingkungan. Kondisi terumbu karang yang memprihatinkan, wisata bahari berkelanjutan yang dibangun Gede Yudarta dan Kaoem Telapak difokuskan pada pemulihan kondisi terumbu karang, dengan program unggulan *Adopt The Coral* yang ditawarkan kepada wisatawan.

Setelah lebih dari sepuluh tahun, program tersebut masih tetap eksis, wisatawan yang berkunjung ke Desa Les akan memasukkan penanaman terumbu karang dalam program mereka. Ekosistem laut Desa Les telah mulai pulih. Tidak hanya itu, mereka juga berkolaborasi membuat film dokumenter berjudul *Fish Don't Cry*, film tersebut ditampilkan jika ada anak-anak sekolah maupun tamu yang berkunjung karena masih sangat relevan hingga saat ini. Sebagai hasil dari upaya berkelanjutan, Desa Les dianugerahi penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, komunitas lokal juga sering mengadakan kegiatan *beach clean-up* guna mendukung pariwisata berkelanjutan serta kegiatan ini sering melibatkan wisatawan asing maupun lokal, menciptakan pengalaman langsung mengenai pentingnya konservasi lingkungan.

Seperti contoh yang telah dipaparkan, melalui adanya kerjasama maupun kolaborasi antar pemerintah, komunitas lokal, organisasi internasional, maupun media dapat mewujudkan kolaborasi dan sinergi dengan efektif dalam mencapai tujuan yang lebih besar kedepannya sehingga program seperti *blue economy* ini dapat terwujud. Hal tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menparekraf Nomor 9 Tahun 2021 terkait kualitas pengelolaan kepariwisataan,

peningkatan sosial ekonomi, serta pelestarian budaya dan lingkungan dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, dengan kebijakan tersebut berupaya mengurangi sampah plastik untuk melindungi tercemarnya laut.

E. KESIMPULAN

Penyelenggaraan KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 dapat dikatakan berhasil dalam memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata internasional, khususnya dalam pariwisata berkelanjutan. Forum ini memberikan dampak positif pada peningkatan hunian hotel di kawasan Nusa Dua hingga 90%, serta dapat menjadi media promosi untuk menarik wisatawan mancanegara. KTT AIS Forum juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui konsumsi produk lokal oleh delegasi internasional, meningkatkan transaksi UMKM, seperti pembelian produk seni, dan membuka peluang investasi di sektor pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali, KTT AIS Forum memperkuat komitmen melalui berbagai inisiatif, seperti diversifikasi destinasi wisata berbasis maritim dengan tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan lokal.

Dalam konteks kerjasama global, forum ini mempererat kerjasama antarnegara pulau dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya laut. Hasil dari kolaborasi ini searah dengan *sustainable development goals (SDG's)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi biru (*blue economy*) yang salah fokusnya pada pariwisata bahari (*marine tourism*). Selanjutnya, inisiatif pariwisata berkelanjutan di Bali diadopsi dengan adanya proyek di Desa Les yang memanfaatkan potensi wisata bahari dan mewujudkan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang positif sekaligus mendukung pariwisata lokal. Secara keseluruhan KTT AIS Forum memberikan kontribusi yang baik terhadap promosi Bali sebagai destinasi internasional dan memperkuat posisinya melalui sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Munir, D., Motik, C., & Sitompul, I. (2011). Mengenal Negara Kepulauan (Buku Bacaan Pendidikan Kelautan) | Archipelago Indonesia Marine Library. In

Archivelago Indonesia Marine Library. KKP-Sekjen-Dewan Kelautan Indonesia., Jakarta. <https://doi.org/978-979-98773-3-8>

Nye, J. S. (2019). Soft Power and Public Diplomacy Revisited. *The Hague Journal of Diplomacy*, 14(1-2), 7–20. <https://doi.org/10.1163/1871191x-14101013>

Artikel Jurnal

Ardiyanto, F., Prakasa, G., & Achmadi, T. (2024). REDISCOVER PARADISE: ELEVATING BALI'S MARINE TOURISM THROUGH SUSTAINABLE SOLID WASTE MANAGEMENT (SSWM). *Journal of Marine-Earth Science and Technology*, 5(1), 16–22. <https://doi.org/10.12962/j27745449.v5i1.1069>

Ariyanti, N. K. A. (2023). DAMPAK PRESIDENSI G20 SEBAGAI FORUM INTERNATIONAL DALAM KEBIJAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BALI. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 141–146. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.811>

Artini, N. W. P., Antara, M., Susrusa, I. K. B., & Ambarawati, I. G. A. A. (2020). Impact of tourism on development in Bali Province. *International Journal of Life Sciences*, 4(2), 19. <https://doi.org/10.29332/ijls.v4n2.429>

Cummings, G., & Greenberg, Z. (2022). Sustainable Tourism in the Context of the Blue Economy. *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*, 1004–1017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98536-7_56

Deni, F., & Sopian, P. (2017). Peran ASEAN Tourism Forum dalam Meningkatkan Pariwisata Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal International & Diplomacy Universitas Satya Negara Indonesia*, 2(2), 279–308. <https://jurnalhiusni.org/index.php/idu/article/view/142>

Erina Aulia. (2023). Upaya Pacific Island Forum Dalam Mengatasi Masalah Perubahan Iklim Di Kawasan Kepulauan Pasifik. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(2), 654–664. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i2.11439>

Gede, W., & Riza Wulandari. (2024). Implementation of Community-Based Tourism in Realizing the Blue Economy and Sustainable Tourism Development at Gianyar Coastal Area. *Advances in Economics, Business and Management Research/Advances in Economics, Business and Management Research*, 716–725. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2_79

- I Wayan Mudana. (2013, August). *Kolaborasi Masyarakat Sipil, Politik Dan Ekonomi Dalam Pemanfaatan Modal Sosial (Kasus Pelestarian Lingkungan Pesisir Pada Masyarakat Bali Aga- Desa Les Bali Utara)*. Jurnal Harian Regional. <https://jurnal.harianregional.com/blje/full-6658>
- I Wayan Suyadnya, Desi Dwi Prianti, Sanggar Kanto, & Putra, D. (2025). The local dynamics of global ecotourism trend in the old Balinese village, Indonesia. *Cogent Arts and Humanities*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2451516>
- Mudana, I. W. (2020). KOLABORASI MASYARAKAT EKONOMI, POLITIK, DAN SIPIL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR DI BALI. *Candra Sangkala*, 1(2). <https://doi.org/10.23887/jcs.v1i2.28764>
- Pickel-Chevalier, S., & Ketut, B. (2016). Towards sustainable tourism in Bali. *Mondes Du Tourisme, Hors-série*. <https://doi.org/10.4000/tourisme.1187>
- Putri, M., & Surya, B. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Terkait Kepariwisata Di Bali. *Wacana/Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 585–599. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.10066>
- Rizky Januar. (2024). Implementation and challenges of sustainable tourism programs in Bali. *Bali Tourism Journal*, 8(2), 33–37. <https://doi.org/10.36675/btj.v8i2.109>
- Syahri Ridani. (2023). *Analisis Diskursus Indonesia dalam Forum The Archipelagic Island and State (AIS) 2023 | Hasanuddin Journal of International Affairs*. Unhas.ac.id. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/35205>
- Ulzikri, A. R. (2023). Politik dan Bencana : Kajian Rekognisi Hak Masyarakat di Pulau Terisolir di Masa Krisis. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSSTER)*, 2(1), 28–39. <https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/8>
- Verheijen, B., & Darma Putra, I. N. (2019). Balinese cultural identity and global tourism: the Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. *Asian Ethnicity*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/14631369.2019.1641691>

Website Artikel

- Affandi, T. (2024, November 21). Maintaining Sustainable Maritime Tourism in Les Village – Kaoem Telapak. Retrieved November 25, 2024, from Kaoemtelapak.org website: <https://kaoemtelapak.org/maintaining-sustainable-maritime-tourism-in-les-village/>
- AIS FORUM. (n.d.). About - AIS Forum. Retrieved October 28, 2024, from aisforum.org website: <https://aisforum.org/about/#who>
- Alexander, C. (2024, July 2). Marine Tourism Central to Development of Blue Economy • Panorama Destination. Retrieved November 28, 2024, from Panorama Destination website: <https://www.panorama-destination.com/dtn-news/marine-tourism-central-to-development-of-blue-economy/>
- Dewi Hendriyani , I. G. A. (2023). Siaran Pers: Menparekraf: AIS Forum 2023 Berdampak Positif pada Sektor Pariwisata Bali. Retrieved November 28, 2024, from Kemenparekraf.go.id website: <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-ais-forum-2023-berdampak-positif-pada-sektor-pariwisata-bali>
- KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF RI. (2021, November 12). Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia. Retrieved November 25, 2024, from kemenparekraf.go.id website: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia>
- KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF RI. (2023, October 10). Siaran Pers KTT AIS Forum 2023: Daftar Kepala Negara dan Delegasi yang Menghadiri KTT AIS Forum 2023. Retrieved November 25, 2024, from Kemenparekraf.go.id website: <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-ktt-ais-forum-2023-daftar-kepala-negara-dan-delegasi-yang-menghadiri-ktt-ais-forum-2023>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023, July 21). KTT AIS FORUM: KOLABORASI NEGARA PULAU DAN KEPULAUAN HADAPI TANTANGAN GLOBAL. Retrieved November 25, 2024, from Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi website: <https://maritim.go.id/detail/ktt-ais-forum-kolaborasi-negara-pulau-dan-kepulauan-hadapi-tantangan-global>

- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. (2023, October 17). KTT AIS Forum 2023: Pemerintah RI Ajak Negara AIS Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, Kemenhub Siap Mendukung di Sektor Transportasi. Retrieved November 28, 2024, from [dephub.go.id website: https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Bktt-ais-forum-2023--pemerintah-ri-ajak-negara-ais-perkuat-pariwisata-berkelanjutan,-kemenhub-siap-mendukung-di-sektor-transportasi](https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Bktt-ais-forum-2023--pemerintah-ri-ajak-negara-ais-perkuat-pariwisata-berkelanjutan,-kemenhub-siap-mendukung-di-sektor-transportasi)
- LOVE BALI . (2023). POSITIVELY IMPACTING BALI AS HOST OF THE 2023 AIS FORUM SUMMIT. Retrieved October 20, 2024, from [lovebali.baliprov.go.id website: https://lovebali.baliprov.go.id/article/detail/1697009454376/positively-impacting-bali-as-host-of-the-2023-ais-forum-summit](https://lovebali.baliprov.go.id/article/detail/1697009454376/positively-impacting-bali-as-host-of-the-2023-ais-forum-summit)
- Meka, N. C. (2024, June 6). Langkah dan Strategi Pemerintah Provinsi Bali Menata Pariwisata Berkelanjutan (N. P. Nirawati, Ed.). Retrieved November 25, 2024, from [RRI.co.id website: https://www.rri.co.id/daerah/739220/langkah-dan-strategi-pemerintah-provinsi-bali-menata-pariwisata-berkelanjutan](https://www.rri.co.id/daerah/739220/langkah-dan-strategi-pemerintah-provinsi-bali-menata-pariwisata-berkelanjutan)
- PDSI KOMDIGI. (2023). Kementerian Komunikasi dan Digital. Retrieved November 28, 2024, from [Komdigi.go.id website: https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/masyarakat-bali-siap-sukseskan-ktt-ais-forum-2023](https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/masyarakat-bali-siap-sukseskan-ktt-ais-forum-2023)
- Sanjaya, Y., & Hastuti, D. (2022, November 21). Empat Alasan Mengapa Bali Cocok Menjadi Tuan Rumah Acara Tingkat Internasional Menurut Pakar Pariwisata UNS - Universitas Sebelas Maret. Retrieved November 20, 2024, from Universitas Sebelas Maret website: <https://uns.ac.id/id/uns-update/empat-alasan-mengapa-bali-cocok-menjadi-tuan-rumah-acara-tingkat-internasional-menurut-pakar-pariwisata-uns.html>
- Vinta. (2023, October 7). Deretan Negara yang Hadir dalam KTT AIS 2023 (Mosita, Ed.). Retrieved November 25, 2024, from [RRI.co.id website: https://www.rri.co.id/internasional/389243/deretan-negara-yang-hadir-dalam-ktt-ais-2023](https://www.rri.co.id/internasional/389243/deretan-negara-yang-hadir-dalam-ktt-ais-2023)



Strategi Komunikasi Politik Partai Gerindra Di Kota Palangka Raya Dalam Pemilu 2024 Dan Pilkada 2025

Abdul Rahman¹, Anita Pransiska², Enika R Siagian³, Mochammad Fernanda Fajeri⁴, Salsabila⁵, Ali Sunarno⁶, Eli Karliani⁷

Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: Salsabila dadisasa95@gmail.com

Article Info

Keywords:

Political Communication Strategy, Social Media, Direct Meetings, Young Voters, Hoax Challenges

Received 13/05/2025

Accepted 19/06/2025

Available online

30/06/2025

Abstract

This study aims to examine the Gerindra Party's political communication strategy in conveying its political message to the people of Palangka Raya in the 2024 General Election and the 2025 Regional Election. Through interviews with party cadres, this study found that Gerindra's political communication in Palangka Raya relies heavily on two main aspects: the use of social media and direct meetings. Social media was chosen because of its efficiency in reaching a wider audience, especially young voters, while direct meetings were emphasized more to reach community groups in areas that are not yet fully accessible by the internet. The Gerindra Party also faces challenges in dealing with hoaxes and inaccurate information and adapting to differences in communication at the central and regional levels. These findings are expected to provide insight into

A. PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan elemen krusial dalam strategi partai politik, karena memungkinkan partai untuk menyampaikan visi, misi, dan program – program kepada masyarakat. Partai Gerindra, seperti partai lainnya, memanfaatkan berbagai metode komunikasi untuk menjangkau audiens yang beragam. Komunikasi ini tidak hanya terbatas pada kampanye atau iklan, tetapi juga mencakup interaksi langsung dengan masyarakat, yang memberi kesempatan bagi partai untuk mendengarkan dan merespons aspirasi rakyat (Ulzikri, 2022). Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, Gerindra berusaha membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, memperkenalkan calon yang diusung, dan mendorong partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Menurut

Wardhani dan Siregar (2020), “Komunikasi Politik adalah jabatan antara partai politik dan masyarakat untuk mengkomunikasikan ideologi dan nilai-nilai partai”.

Seorang Ilmuan Komunikasi politik Indonesia, Maswadi Rauf, berpendapat bahwa komunikasi politik adalah sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi selalu bercirikan politik dan selalu berkaitan langsung dengan kekuasaan politik di dalam sebuah negara, pemerintah dan juga aktivitas dari seorang komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik itu sendiri. Dalam konteks ini komunikasi politik dapat dilihat dalam dua dimensi utama, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan komunikasi sebagai kegiatan politik ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik bercirikan penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh aktor politik kepada semua pihak lain. Kegiatan ini dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial sehari-hari, karena itu kegiatan ini disebut kegiatan empirik. Komunikasi politik disebut dengan komunikasi ilmiah karena salah satu kegiatan politik politik selalu berkaitan langsung.

Salah satu tujuan utama komunikasi politik adalah membangun kepercayaan publik terhadap partai dan calon yang diusung. Gerindra menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi utama dalam pemilu 2024 dan pilkada 2025 untuk menjangkau pemilih muda, tetapi tetap mempertahankan komunikasi tatap muka untuk memilih yang lebih tua dan kelompok di daerah terpencil. Seperti yang diungkapkan oleh Sukatno (2018), “media sosial memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda.”

Meskipun media sosial efektif dalam menyebarkan pesan dengan cepat dan luas, ada tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah seperti Palangkaraya, komunikasi lebih sering dilakukan melalui pertemuan langsung, karena masyarakat di sana lebih memercayai interaksi tatap muka. Hal ini sesuai dengan temuan Nugroho (2019) yang menyatakan bahwa, “Komunikasi tatap muka lebih dipercaya oleh masyarakat di daerah dibandingkan dengan komunikasi melalui media sosial.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana strategi komunikasi Politik Gerindra dalam pemilu 2024 dan Pilkada 2025 di Palangkaraya dapat menciptakan hubungan yang efektif dengan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini akan fokus pada analisis metode komunikasi yang digunakan serta tantangan yang di hadapi partai dalam menyampaikan pesannya.

B. LITERATURE REVIEW

Strategi Komunikasi Politik Gerindra

Konsep Komunikasi politik dijelaskan berdasarkan pendapat Maswadi Rauf (2003) dan Kathleen Hall Jamieson yang menekankan pentingnya penyampaian pesan, interaksi, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik.

Peran Media Dalam Membentuk Opini Publik

Khususnya penggunaan media sosial sebagai ruang publik yang terhubung (Benkler, 2020) dan dampaknya terhadap partisipasi politik generasi muda (Nasrullah, 2020; Sukatno, 2018). Penulis membandingkan efektivitas media sosial dengan komunikasi tatap muka, mengacu pada penelitian Norris (2019), Yuniani (2020), dan Nugroho (2019).

Teori “Situational Communication Theory” (Gruing 2021)

Digunakan untuk menjelaskan bagaimana Gerindra menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan kondisi sosial budaya dan geografis. Penulis juga membahas strategi komunikasi dalam situasi krisis (Coombs, 2019) khususnya terkait penyebaran hoaks. Peran tokoh masyarakat dalam penerimaan pesan politik juga dibahas, mengacu pada penelitian Lestari (2019).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena komunikasi antara partai Gerindra dan masyarakat di kota Palangka Raya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Aditia Adintara, S.An, Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah yang di pilih sebagai informan utama karena keterlibatannya langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi politik partai.

Hasil wawancara tersebut dianalisis secara induktif untuk menemukan pola-pola umum yang mencerminkan cara Partai Gerindra menyampaikan pesan politik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yang

memfokuskan pada penyajian data dalam bentuk narasi yang menggambarkan secara rinci kegiatan komunikasi politik partai.

D. HASIL DAN DISKUSI

Maswadi, Seorang Ilmuan komunikasi politik indonesia, berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan objek kajian dalam ilmu politik. Hal ini dikarnahkan pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi selalu memiliki unsur politik dan berkaitan erat dengan kekuasaan politik dalam suatu negara, pemerintah, serta peran komunikator sebagai pelaku dalam arena politik.

Dalam pandangannya, komunikasi politik dapat di lihat dari dua dimensi utama : pertama, sebagai kegiatan politik, yaitu penyampaian pesan politik oleh aktor politik kepada masyarakat. Kegiatan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat empiris. Kedua, komunikasi politik juga dianggap sebagai kegiatan ilmiah ketika berhubungan langsung dengan sistem sistem politik di suatu negara.

Kathleen Hall Jamieson, Seorang ahli dalam komunikasi politik, mendefinisikan komunikasi politik sebagai “ proses di mana individu berupaya mempengaruhi satu sama lain dalam rangka membuat keputusan mengenai tindakan bersama”. Definisi ini menyoroti pentingnya interaksi dan persaingan dalam komunikasi politik, di mana berbagai pihak berusaha mengajak orang lain untuk mendukung pandangan atau kebijakan tertentu.

Diera digital saat ini, informasi dapat diakses dan di sebarakan dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform online. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi politisi, partai politik, dan kelompok kepentingan untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat tanpa harus bergantung pada media massa tradisional. Namun, kemudahan ini juga memnbuka kemungkinan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menipulatif, yang bisa membingungkan dan mempengaruhi opini publik dengan cara yang tidak diinginkan (Noorikhsan 2023).

Komunikasi Politik adalah dasar bagi proses politik yang sehat dan demokratis. Dengan komunikasi politik yang efektif dan inklusif, kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan memperkuat stabilitas politik, dan membangun masyarakat yang adil. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendukung komunikasi yang transparan, responsif, dan memberdayakan (Nainggolan & Ivanna, 2024).

Media politik adalah alat utama untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Media massa, baik yang tradisional maupun digital, memainkan peranan penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil proses politik. Dengan memanfaatkan media politik, pesan-pesan politik dapat mencapai audiens yang lebih luas, meningkatkan visibilitas para aktor politik, dan menggerakkan dukungan masyarakat (Degodona 2023).

Strategi komunikasi politik adalah rencana atau langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi politik tertentu. Strategi ini mencakup pemilihan saluran komunikasi, penggunaan narasi yang efektif, serta pengelompokan audiens agar pesan politik dapat disampaikan secara optimal kepada target yang diinginkan.

Tujuan Komunikasi Politik

Tujuan komunikasi politik adalah untuk menyampaikan informasi, membangun pemahaman, dan memengaruhi sikap serta perilaku masyarakat terkait isu-isu politik. Melalui komunikasi yang efektif, pihak-pihak seperti pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat dapat menjelaskan kebijakan, mengedukasi publik, dan mendorong partisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, komunikasi politik juga berfungsi untuk menjalin hubungan antara pemimpin dan rakyat, sehingga tercipta dialog yang konstruktif dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, komunikasi politik memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memperkuat stabilitas sosial di dalam masyarakat. Partai Gerindra di Palangkaraya menggunakan dua pendekatan utama dalam menyampaikan pesan politik menggunakan media sosial dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Strategi ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik sosial dan geografis di Kalimantan Tengah khususnya di Palangkaraya, yang terdiri dari berbagai kelompok usia dan tingkat akses ke teknologi informasi.

1. Media Sosial Untuk Kaum Muda

Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik sejalan dengan teori networked public sphere dari Yochai Benkler (2020), yang menanyakan bahwa platform digital menciptakan ruang public yang lebih terbuka dan partisipatif. Penelitian oleh Nasrullah (2020) juga menyoroti bahwa media sosial memberikan peluang besar bagi partai politik untuk membangun

komunikasi dua arah, terutama dengan generasi muda yang aktif di dunia digital. Partai Gerindra tidak hanya menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk menciptakan dialog dengan konsstituen. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian Purwaningsih & Nugroho (2021), yang menunjukkan bahwa interaktivitas di media sosial dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan public terhadap partai politik.

2. Pertemuan Langsung

Di daerah yang belum terjangkau internet dengan baik, pertemuan tatap muka menjadi cara utama untuk berkomunikasi. Ini sesuai dengan teori face-to-face-political communication yang di jelaskan oleh Norris (2019), yang menekankan bahwa interaksi langsung dapat menciptakan ikatan emosional dan membangun kepercayaan yang lebih kuat antara partai dan Masyarakat. Partai Gerindra menerapkan metode ini melalui kunjungan lapangan dan dialog public. Penelitian oleh Yuniani (2020), Menunjukkan bahwa komunikasi langsung lebih efektif dalam menyampaikan pesan politik kepada Masyarakat perdesaan, terutama yang belum terbiasa dengan media digital.

3. Tantangan Komunikasi Politik

Kesenjangan Akses Digital

Ketidak merataan akses internet di daerah terpencil menjadi hambatan dalam penyebaran informasi politik secara daring. Data dari BPS dan studi oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang kekurangan insfrastruktur digital yang memadai.

Penyebaran hoxs dan informasi

Masalah penyebaran informasi palsu adalah tantangn yang serius. Studi oleh Pratama & Herdiansyah (2022) mencatat bahwa media sosial sering digunakan untuk penyebaran hoaxs politik, yang dapat mempengaruhi persepsi public. Partai gerindra berusaha mengatasi hal ini dengan memberikan klarifikasi cepat melalui saluran digital dan komunikasi langsung, sesuai dengan pendekatan crisis communication yang di sarankan oleh Coombs (2019) .

Rendahnya literasi Politik

Rendahnya pemahaman Masyarakat tentang peran partai politik juga menjadi tantangan Partai Gerindra menjawab ini dengan memberikan edukasi politik dalam setiap interaksi langsung. Ini mendukung temuan Sihombing (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi politik Masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi komunikasi partai.

4. Penyesuaian Pendekatan Berdasarkan Segmentasi Sosial

Partai Gerindra menyadari bahwa strategi yang berhasil di perkotaan tidak selalu efektif untuk perdesaan. Oleh karena itu, pendekatan mereka bersifat adaptif dan berbasis pada segmentasi sosial. Pendekatan ini mendukung teori situational communication theory dari Gruing (2021), yang menekankan pentingnya penyesuaian strategi komunikasi dengan kondisi sosial budaya dan geografis audiens. Kerjasama dengan tokoh Masyarakat, pemuda local, dan tokoh agama memperkuat efektivitas penyampain pesan politik. Studi oleh Lestari (2019) menunjukkan bahwa keberadaan figur local yang dipercaya Masyarakat dapat meningkatkan penerimaan terhadap pesan - pesan politik yang disampaikan partai.

5. Dampak Dan Efektivitas Komunikasi

Kombinasi antara komunikasi digital dan tatap muka telah membantu partai Gerindra membangun citra sebagai partai yang responsive dan dekat dengan Masyarakat. Penelitian oleh Arifianto (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi politik sangat bergantung pada kemampuan partai dalam membangun hubungan emosional dan keterlibatan langsung dengan publik.

E. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, strategi komunikasi politik Partai Gerindra dalam Pemilu 2024 dan Pilkada 2025 di Palangka Raya menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap karakteristik masyarakat setempat. Penggunaan media sosial efektif untuk menjangkau pemilih muda, sementara pertemuan langsung tetap menjadi pilihan utama untuk berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang lebih tua atau yang

tinggal di daerah terpencil. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh partai adalah hoaks dan keterbatasan akses informasi di beberapa daerah. Namun, dengan pendekatan yang lebih langsung dan terbuka, Gerindra berhasil menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan meyakinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, D. (2021). Membangun hubungan emosional melalui komunikasi politik: studi kasus partai Gerindra. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 9(1), 40-53.
- Benkler, Y. (2020). Networked public Sphere: Media Sosial dalam demokrasi digital. *Jurnal komunikasi dan teknologi*, 14(2), 55-70.
- Coombs, W. T. (2019). Crisis Communication Dalam Strategi Politik: Menjawab di simformasi secara responsif. *Journal of Crisis Management and Communication*, 13(1), 25-39.
- Degodona, R. (2023). Peran Media Politik dalam membentuk opini publik. *Jurnal komunikasi sosial politik*, 10(2), 90-105.
- Gruing, J. (2021). Situation Communication Theory dan relevansinya dalam strategi komunikasi politik. *Journal Of Publik Relations Strategy*, 15(1), 59-73.
- Lestari, N. (2019). Peran tokoh lokal dalam komunikasi politik partai ditingkat komunikasi. *jurnal sosiologi politik*, 10(2), 74-86.
- Nainggolan, M., & Ivanna, D. (2024). Transparansi dan Partisipasi dalam Komunikasi Politik Modern. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 18(1), 22-34.
- Nasrullah, R. (2020). Komunikasi Politik Dua Arah di Era Media Sosial. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 8(1), 33-47.
- Noorikhshan. (2023). Komunikasi politik di era digital : antara peluang dan tantangan . *Jurnal Media dan Politik*, 15(3), 67-81.
- Norris, P. (2019). Face-to-face political communication : Teori dan Praktik di Wilayah Rural. . *Jurnal Of Political and Engagement*, 10(2), 45-59.
- Nugroho, A. (2019). Komunikasi Politik dan Referensi Pemilih di Daerah. , *Wacana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 17 (2), 145- 160.

- Pratama, H., & Herdiansyah, A. (2022). Penyebaran Hoax Politik Di Media Sosial :Dampaknya terhadap persepsi publik. *Jurnal Etika Informasi*,9(3),101-117.
- Purwaningsih, D., & Nogroho, A. (2021). Peran interaktifitas media sosial dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. *Jurnal media dan partisipasi politik*,12(3),88-102.
- Rahmawati, L. (2021). Kesenjangan Akses Digital dan Tantangan Pemerataan Informasi Politik di Indonesia. *Jurnal Informasi dan pembangunan*,11(2),66-78.
- Rauf, M. (2003). *Ilmu Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sihombing, M . (2020). Literasi politik sebagai pilar partisipasi demokratis masyarakat indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik*,6(2),44-56.
- Sukatno. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Komunikasi Politik*,6(1),21-35.
- Thomas. (2020). Dimensi Komunikasi Politik Dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*,12(1),45-57.
- Ulzikri, A. R. (2022). Efektifitas Strategi Kampanye Politik Melalui Media Sosial : Belajar Pada Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)*, 1(1), 1–13.
- Wardhani, B., & Siregar, F. (2020). *Komunikasi Politik Dalam Dinamika Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Yuniani, R. (2020). Efektivitas komunikasi tatap muka dalam kampanye politik di erdesaan. *Juenal Komunikasi Masyarakat*,7(1),19-32.



Implementasi Desentralisasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Pemerintahan Daerah

Al Hafiz Rasya Ramadhan¹, Hudaidah²

Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: alhafizrasyaramadhan@gmail.com

Article Info

Keywords:

decentralization,
public services,
local government,
governance,
service quality

Received 26/05/2025

Accepted 19/06/2025

Available online
30/06/2025

Abstract

This study investigates the implementation of decentralization in improving the quality of public services at the local government level. The purpose of the research is to examine how decentralization policies influence service delivery performance and to identify key factors that contribute to more effective public services. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing interviews, documentation, and observation as the main data collection techniques. The research was conducted in selected regional government institutions that have actively implemented decentralization strategies. The findings indicate that decentralization, when properly executed, has a positive impact on public service quality. Increased local authority and autonomy enable faster decision-making, better allocation of resources, and services that are more responsive to community needs. However, the effectiveness of decentralization largely depends on institutional capacity, human resource competence, transparency, and accountability mechanisms. In some cases, challenges such as bureaucratic inefficiency and lack of coordination still hinder optimal service delivery. The study concludes that decentralization can significantly improve public services if accompanied by capacity building, institutional reform, and strong governance practices. It recommends strengthening local institutional structures and enhancing community participation to ensure that decentralization leads to more citizen-oriented services.

A. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi mendasar dalam sistem pemerintahan melalui pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan ini secara formal dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Simanjuntak, 2015).

Tujuan utama desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan di daerah, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons kebutuhan warganya secara lebih efektif dan efisien. (Wiranata, 2025).

Namun demikian, implementasi desentralisasi di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Laporan Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan layanan publik antarwilayah masih tinggi, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar. Sebagian daerah mampu menunjukkan inovasi dan peningkatan kinerja pelayanan, sementara lainnya terjebak dalam persoalan tata kelola, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana desentralisasi telah benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat lokal.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji hal ini. Misalnya, penelitian oleh Sujarwoto (2021) menyoroti bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap perbaikan akses layanan kesehatan di kabupaten tertentu, namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitasnya. Sementara itu, Nugroho dan Wicaksono (2022) menekankan pentingnya aspek kepemimpinan kepala daerah dan transparansi anggaran sebagai faktor pendukung efektivitas layanan publik. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat kontekstual, dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, kapasitas institusional, dan mekanisme pengawasan yang berjalan di masing-masing daerah.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi dalam kaitannya dengan kualitas layanan publik di pemerintahan daerah. Fokus utama diarahkan pada sejauh mana pelimpahan kewenangan telah memperbaiki tata kelola layanan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung dalam proses tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara desentralisasi dan kinerja pelayanan publik sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan.

Selain itu, perlu dicermati bahwa efektivitas desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang bersifat struktural dan administratif, tetapi juga oleh dinamika sosial-politik yang berkembang di tingkat lokal. Faktor seperti partisipasi

masyarakat, peran legislatif daerah, dan keterlibatan aktor non-pemerintah turut memengaruhi arah dan kualitas layanan yang diberikan. Dalam konteks ini, pendekatan yang menekankan pada governance yang kolaboratif menjadi semakin penting. (Sakdiyah, 2025)

Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga secara merata. Di sisi lain, terdapat pula tantangan yang kompleks dalam implementasi desentralisasi, seperti adanya ketimpangan kapasitas antardaerah, kesenjangan fiskal, dan keterbatasan mekanisme evaluasi yang obyektif. (Wibowo, 2025).

Daerah-daerah dengan sumber daya dan aparatur yang terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola layanan secara optimal. Hal ini diperburuk oleh lemahnya sistem monitoring dan akuntabilitas, yang menyebabkan kebijakan publik kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap bagaimana kebijakan desentralisasi benar-benar memengaruhi kualitas pelayanan di berbagai daerah, bukan hanya dari sisi output administratif, tetapi juga dari perspektif kepuasan dan keadilan layanan. (Arsjad, 2018)

Nurhayati, (2025). Mengatakan bahwa Artikel ini tidak hanya berusaha menjelaskan hubungan antara desentralisasi dan layanan publik, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan studi literatur dan data sekunder terkini untuk menyajikan gambaran empiris yang representatif. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta menjadi referensi dalam pengembangan model tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif dan inklusif.

B. LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai desentralisasi dan layanan publik telah menjadi salah satu fokus utama dalam studi tata kelola pemerintahan, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Sejumlah penelitian berupaya memahami sejauh mana pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Namun,

pendekatan yang digunakan dan penekanan analisis dalam setiap studi menunjukkan keragaman metodologis dan konseptual yang patut diperhatikan secara kritis. (Edward et al, 2024).

Salah satu penelitian yang cukup berpengaruh adalah studi yang dilakukan oleh Sujarwoto (2021), yang bertujuan mengkaji dampak desentralisasi terhadap akses dan persebaran layanan kesehatan di wilayah-wilayah non-perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data survei nasional, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi meningkatkan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan.

Namun, pendekatan ini lebih menekankan pada dimensi kuantitas layanan, sementara aspek kualitas seperti kompetensi tenaga kesehatan atau kepuasan pengguna kurang mendapat perhatian. Keterbatasan lain yang muncul adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel kontekstual seperti tingkat partisipasi masyarakat atau kepemimpinan kepala daerah, yang berpotensi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan lokal.

Dalam penelitian lain, Mulyadi dan Prasetyo (2020) menganalisis kinerja pelayanan publik di sektor pendidikan pasca-desentralisasi melalui studi kasus di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pejabat daerah, guru, dan masyarakat. Tujuan utama dari studi ini adalah mengevaluasi persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengelolaan anggaran, tidak semua daerah mampu menggunakan kewenangan tersebut secara optimal. Kelebihan studi ini terletak pada kedalaman naratif dan konteks lokal yang dibangun, namun metodologi kualitatifnya kurang disertai dengan pengujian triangulasi data secara ketat, yang dapat memengaruhi reliabilitas temuan. (Hilman et al, 2024).

Lebih lanjut, penelitian oleh Kurniawan et al. (2022) mencoba menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) dalam mengevaluasi efektivitas penganggaran berbasis kinerja di era desentralisasi fiskal. Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi berpotensi mendorong inovasi daerah dalam pengelolaan anggaran jika disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Kekuatan pendekatan ini terletak pada integrasi antara data statistik dan perspektif aktor lokal. Namun demikian, keterbatasan muncul dalam

hal generalisasi, karena studi dilakukan pada daerah-daerah yang sudah tergolong mapan dari segi fiskal dan kapasitas birokrasi, sehingga kurang merepresentasikan kondisi daerah tertinggal atau rentan. (Azdi & Nurwahid, 2024).

Secara konseptual, sebagian besar literatur menggunakan kerangka *governance dan public service delivery* yang berakar pada teori *New Public Management (NPM)*, yang menekankan efisiensi, desentralisasi administratif, dan orientasi hasil. Namun, sedikit di antaranya yang mengeksplorasi dimensi partisipatif atau pendekatan alternatif seperti *co-production* dan *collaborative governance*, yang sesungguhnya semakin relevan dalam konteks kompleksitas tata kelola lokal di era digital dan demokrasi partisipatif (Ulzikri, 2023). Formulasi teoritis yang digunakan cenderung eksplisit dalam menyebut model-model tata kelola, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan faktor-faktor sosial-politik seperti identitas lokal, relasi kuasa antara elit daerah, dan kapasitas masyarakat sipil dalam memengaruhi layanan publik. (Rudi, 2021).

Dari berbagai literatur yang telah dikaji, terlihat bahwa isu utama yang muncul berkisar pada kesenjangan antara desain kebijakan desentralisasi dan realitas implementasinya di lapangan. Metodologi yang digunakan pun masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan parsial, belum banyak yang membangun model integratif untuk menjelaskan dinamika desentralisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengembangkan kerangka analisis yang mampu menjelaskan interaksi antara struktur institusi, kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam konteks lokal. (Nazla, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan desentralisasi dan dampaknya terhadap kualitas layanan publik di tingkat pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial-politik yang kompleks dan kontekstual, terutama dalam mengkaji dinamika kebijakan, perilaku aktor, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. (Susanti et al, 2018).

Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis. Selanjutnya dilakukan

identifikasi kasus daerah yang relevan, berdasarkan kriteria: variasi geografis, tingkat kemandirian fiskal, dan kinerja pelayanan publik.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat daerah, pegawai birokrasi, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan evaluasi kinerja daerah, dan publikasi resmi dari instansi terkait.

Langkah-langkah penelitian mencakup:

1. Studi pendahuluan dan pemetaan lokasi (bulan pertama),
2. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi (bulan kedua dan ketiga),
3. Koding dan kategorisasi data tematik (bulan keempat),
4. Analisis dan interpretasi temuan berdasarkan kerangka teori (bulan kelima),
5. Penyusunan hasil dan simpulan (bulan keenam).

Waktu dan Lokasi Penelitian.

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025, dengan lokasi studi pada dua daerah yang berbeda karakteristiknya, yakni satu kabupaten di Pulau Jawa dan satu kabupaten di luar Jawa. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk menangkap variasi praktik desentralisasi dan kinerja layanan di wilayah yang memiliki sumber daya berbeda.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, yang memberikan ruang bagi peneliti dan informan untuk mengeksplorasi isu secara mendalam. Teknik ini juga memungkinkan penyesuaian pertanyaan selama proses wawancara sesuai konteks yang berkembang. Informan dipilih secara purposif berdasarkan posisi dan keterlibatan mereka dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, seperti:

- Peraturan daerah dan RPJMD,
- Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP),
- Statistik daerah dari BPS,
- Laporan evaluasi dari Kemendagri dan BPK.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi pola-pola atau tema dalam data kualitatif. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, kemudian dilanjutkan dengan koding manual dan

pengelompokan data ke dalam kategori tematik sesuai fokus penelitian, seperti “akses layanan”, “transparansi kebijakan”, dan “kapasitas kelembagaan”.

D. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting terkait implementasi desentralisasi dalam penyelenggaraan layanan publik di dua daerah dengan karakteristik berbeda: satu kabupaten di Jawa Timur dan satu kabupaten di Sulawesi Selatan.

Kinerja Layanan Publik

Data menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik antar daerah. Di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, 83% responden menyatakan puas terhadap layanan administrasi kependudukan dan pendidikan. (Dimas et al, 2024). Sebaliknya, di daerah dengan kapasitas fiskal rendah, tingkat kepuasan hanya mencapai 58%. Statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi desentralisasi tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal dan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing daerah. (Riyadi et al, 2015).

Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil wawancara dengan aparatur daerah dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa transparansi dalam perencanaan anggaran dan pelaporan kegiatan lebih baik di daerah yang memiliki sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi. Sebaliknya, daerah yang belum mengadopsi sistem digitalisasi cenderung memiliki hambatan dalam penyampaian informasi kepada publik. Temuan ini diperkuat oleh analisis dokumen RPJMD dan LAKIP yang menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana program dan capaian kinerja tahunan pada salah satu lokasi studi. (Betan & Nugroho, 2021).

Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik masih tergolong rendah. Hanya 28% responden yang pernah dilibatkan dalam forum Musrenbang atau konsultasi publik. Ini menjadi temuan tak terduga karena dalam dokumen perencanaan daerah, partisipasi masyarakat disebut sebagai prinsip utama tata kelola. (Sanggenafa et al, 2025).

Uji Signifikansi

Untuk mendukung validitas temuan kuantitatif, dilakukan uji Chi-Square terhadap hubungan antara kemandirian fiskal daerah dan tingkat kepuasan layanan publik. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $p = 0.031 (< 0.05)$, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

Diskusi

Temuan penelitian ini mendukung hipotesis awal bahwa implementasi desentralisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik, namun efeknya bersifat kontekstual dan tidak merata. Daerah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang baik mampu memanfaatkan kewenangan otonomi secara optimal. Sementara itu, daerah dengan keterbatasan sumber daya justru mengalami stagnasi atau bahkan penurunan dalam kualitas layanan. (Nurjanah, 2024).

Ketidakterdugaan muncul pada rendahnya partisipasi masyarakat, yang dalam teori good governance dianggap sebagai indikator penting keberhasilan desentralisasi. Penjelasan pasca hoc atas temuan ini mengarah pada adanya budaya birokrasi yang masih sentralistik dan belum sepenuhnya membuka ruang partisipatif yang bermakna (Darmawan et al, 2018).

Dalam menafsirkan hasil, perlu dicermati beberapa sumber potensi bias, antara lain keterbatasan responden di daerah terpencil, serta kemungkinan subjektivitas dalam wawancara yang memengaruhi narasi data. Selain itu, overlapping antarindikator seperti kemandirian fiskal dan kapasitas aparatur juga menjadi tantangan dalam mengisolasi pengaruh tiap faktor terhadap kualitas layanan (Trisnantoro, 2018).

Ukuran efek dari hubungan antara variabel fiskal dan kepuasan layanan memang signifikan, tetapi masih perlu dikaji lebih lanjut dengan populasi dan cakupan yang lebih luas. Kelemahan lain dari penelitian ini adalah belum maksimalnya penggunaan data longitudinal yang dapat menggambarkan dinamika perubahan kinerja layanan dari waktu ke waktu (Ansanai & Rasyid, 2025).

Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada kesiapan internal daerah, baik dari segi sistem, kepemimpinan, maupun partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah harus menjadi prioritas dalam kerangka desentralisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Simanjuntak, 2015).

Grafik 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah

Daerah	Kepuasan Tinggi (%)	Kepuasan Rendah (%)
Daerah Kapasitas Tinggi	83	17
Daerah Kapasitas Rendah	58	42

Keterangan:

Grafik batang ini menunjukkan perbedaan signifikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di dua kelompok daerah berdasarkan kapasitas fiskal. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki persentase kepuasan yang jauh lebih besar dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah, menandakan pengaruh kapasitas fiskal terhadap kualitas layanan. (Manduapessy, 2020).

Grafik 2. Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang dan Konsultasi Publik

Partisipasi Masyarakat (%)
28
72 (Tidak pernah berpartisipasi)

Keterangan:

Diagram lingkaran (pie chart) ini mengilustrasikan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan publik. Hanya 28% responden yang mengaku pernah terlibat dalam forum Musrenbang atau konsultasi publik, menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan warga dalam tata kelola pemerintahan daerah. (Aisyi, 2024).

Grafik 3. Diagram Radar (Spider Chart) — Perbandingan Aspek Layanan Publik di Dua Daerah

Aspek Layanan	Daerah Kapasitas Tinggi	Daerah Kapasitas Rendah
Aksesibilitas	85	60
Transparansi	80	50
Kualitas SDM	75	45

Aspek Layanan	Daerah Kapasitas Tinggi	Daerah Kapasitas Rendah
Kepuasan Pengguna	83	58
Partisipasi Publik	40	28

Keterangan:

Diagram radar ini menggambarkan performa lima aspek utama layanan publik yang diukur di dua daerah studi. Terlihat jelas bahwa daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki skor yang lebih baik di semua aspek, terutama dalam hal aksesibilitas, transparansi, dan kepuasan pengguna. Namun, kedua daerah sama-sama menunjukkan kelemahan pada partisipasi publik, yang keduanya masih rendah. (Sukmana et al, 2020).

Grafik 4. Grafik Garis Tren Kepuasan Layanan Publik Selama 3 Tahun

Tahun	Daerah Kapasitas Tinggi (%)	Daerah Kapasitas Rendah (%)
2022	75	50
2023	80	55
2024	83	58

Keterangan:

Grafik garis ini menunjukkan tren kenaikan tingkat kepuasan layanan publik selama tiga tahun terakhir pada dua jenis daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi menunjukkan peningkatan yang konsisten dan lebih signifikan dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang pertumbuhannya relatif lambat. (Suranto et al, 2021).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di pemerintahan daerah, terutama di wilayah yang memiliki kapasitas fiskal dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, efektivitas desentralisasi tidak merata, karena daerah dengan keterbatasan sumber daya menghadapi tantangan serius dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang optimal. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi

menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong keterlibatan warga dalam tata kelola daerah.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, transparansi, dan budaya partisipatif di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah secara menyeluruh menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan akuntabel. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat mekanisme pendampingan dan pelatihan bagi aparatur daerah, serta mengembangkan sistem informasi yang mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi yang efektif harus dilandasi oleh sinergi antara kebijakan, kapasitas sumber daya, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan layanan publik yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifqi Azdi, Raul Hidayat Nurwahid, & Hayat. (2024). Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik: Dampak Pada Pelayanan Masyarakat. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(2), 776–791.
- Aisyi, R. R. (2024). Analisis Enterprise Risk Management, Firm Size, Dan Listing Age Terhadap Nilai Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020 & 2021) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ansanai, Y., & Rasyid, A. (2025). Tantangan dan Strategi Reformasi Birokrasi di Negara Berkembang. *Journal of Public Policy*, 1(1), 60-73.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa karyamukti kecamatan mootilango kabupaten gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16-32.
- Bank Dunia. (2023). Indonesia Economic Prospects: Reviving Growth through Economic Reforms. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/>
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Darmawan, S. S., Hamid, A., & Ismanto, G. (2018). Strategi Kpu Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Dimas, D. B. T. G., Fauzi, E. A., & Yanur, M. . (2024). Penerapan Sistem Informasi Dukcapil Oleh Itah (SI-DOI) Dalam Menunjang Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka

- Raya. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin, 11(1), 719–734.
- Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New public manajemen: studi kasus penerapan new public manajemen dalam organisasi publik di indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(2), 54-62.
- Hilman, Y. A., Muamanah, V. R. ., Sya'diah, H. ., Amelia, R., & Zulaikah, S. . (2024). Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Pongkok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(1), 701–707.
- Kurniawan, D., Sari, N. P., & Yusuf, A. H. (2022). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja di era desentralisasi fiskal: Studi mixed-methods pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(2), 145–163. 12345
- Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 4(2), 39-57.
- Mulyadi, T., & Prasetyo, A. (2020). Pelayanan publik bidang pendidikan dalam konteks desentralisasi: Studi kasus beberapa kabupaten di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 8(1), 55–72.
- NAZLA, S. N. (2024). Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi Apbd Otonomi Khusus Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nugroho, Y., & Wicaksono, D. (2022). Kepemimpinan kepala daerah dan transparansi anggaran: Kunci peningkatan layanan publik pasca-desentralisasi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 9(3), 210–228.
- Nurhayati, N. (2025). Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kolaboratif: Integrasi Faktor-faktor Kunci (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Nurjanah, P. L. (2024). Dampak Zakat Terhadap PDRB Per Kapita: Pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) pada 34 Provinsi di Indonesia (Master's thesis, FEB UIN JAKARTA).
- Riyadi, S., Hermawan, A., & Sumarwan, U. (2015). Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor pertanahan Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 8(1), 49-58.
- Rudi, R. (2021). Kolaborasi dalam Program Inovasi Delivery Passport Service di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar= Collaboration in the Delivery Passport Service Innovation Program at the Makassar City Immigration Office Class I (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sakdiyah, H. (2025). Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 3(1), 1-11.
- Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Ba'ka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam

- Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 3(1), 22-28.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130.
- Sujarwoto, S. (2021). Desentralisasi dan distribusi layanan kesehatan: Studi nasional berbasis data panel. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 101–119.
- Sukmana, F. H., Hamdi, H., & Maryanti, S. (2020). Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Survei Persepsi Publik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 287-315.
- Suranto, S., Darumurti, A., Eldo, D. H. A. P., & Habibullah, A. (2021). Potret Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 97-102.
- Susanti, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan sidikalang kabupaten dairi. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 47-57.
- Trisnantoro, L. (2018). Memahami penggunaan ilmu ekonomi dalam manajemen rumah sakit. UGM press.
- Ulzikri, A. R. (2023). Politik dan Bencana : Kajian Rekognisi Hak Masyarakat di Pulau Terisolir di Masa Krisis. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSSTER)*, 2(1), 28–39.
<https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/8>
- Wibowo, A. (2025). Hukum Administrasi Negara. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wiranata, B. (2025). Peran Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Belanja Daerah untuk meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



Pengaruh Stabilitas Keamanan Indo-Pasifik melalui AOIP terhadap Ketegangan China-Taiwan dalam Penyelesaian Sengketa Maritim

Muh. Nurfaiz Fahmi¹, Imam Fadhil Nugraha²
Universitas Hasanuddin
Email: muhnurfaizfahmi@gmail.com

Article Info

Keywords:

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), China-Taiwan, Maritime Security.

*Received 30/05/2025
Accepted 19/06/2025
Available online
30/06/2025*

Abstract

This research analyzes ASEAN's role through the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) in responding to China–Taiwan tensions that threaten regional maritime security. AOIP promotes cooperation based on inclusivity, ASEAN centrality, and respect for international law. Despite broad support from major partners like the U.S. and Japan, AOIP's effectiveness remains limited due to its non-binding nature and ASEAN's cautious stance toward China's assertiveness. Using a descriptive-analytical method, the research finds that AOIP lacks strategic tools to prevent escalation or address real-time threats. The study recommends strengthening ASEAN's collective capacity through early warning mechanisms and deeper multilateral cooperation. AOIP must evolve beyond a normative framework into a proactive platform capable of supporting regional stability and managing power rivalries in the Indo-Pacific.

A. PENDAHULUAN

Setiap kawasan di penjuru belahan dunia, mempunyai julukannya tersendiri, sama seperti halnya dari Indo-Pasifik. Menurut (Berkofsky & Miracola, 2019), Indo-Pasifik merupakan sebuah konsep yang mendapatkan atensi khusus dan menjadi sebuah peningkatan dalam sebuah wacana geostrategis dan geopolitik dan telah menjadi rujukan daripada akademisi, analis, hingga pembuat kebijakan, yang juga awalnya dikenal pada tahun 2010. Lebih lanjut, dalam mengenal istilah Indo-Pasifik, kawasan ini sebenarnya merupakan dasar dari sebuah istilah maupun gambaran dari biogeografis yang juga terdapat beberapa kawasan yang mencakup diantara wilayah tersebut, diantaranya adalah laut Samudra Pasifik Barat, Samudra Pasifik Tengah, Samudra Hindia, dan bahkan merujuk kepada Laut China Selatan yang kerap diketahui sebagai Indo-Pasifik Barat (Yadav, 2022).

Melihat berbagai perkembangan yang terdapat dalam kawasan ini, Indo-Pasifik telah banyak digunakan dalam studi hubungan internasional dalam memperkenalkan kerangka atau konsep kerja sama regional yang mencakup berbagai bidang yang diantaranya seperti bidang ekonomi, politik, perdagangan, hingga pada bermacam-macam isu militer yang pada akhirnya telah membuat Indo-Pasifik menjadi sebuah kawasan yang panas dikarenakan kompleksitasnya (Yadav, 2022). Lebih lanjut, meskipun istilah Indo-Pasifik telah mengalami popularitas pada abad ke-21, sebenarnya istilah ini telah muncul dalam abad ke-19, yang dimana jika dengan seksama melihat pada masa geopolitik kontemporer yang sekarang, terdapat sebuah klaim bahwa istilah Indo-Pasifik bermula dari sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe sebelum Parlemen India melakukannya pada tahun 2007.

Meskipun tidak adanya sebuah hak mutlak dalam kepemilikan istilah tersebut, Shinzo Abe dalam pernyataannya yang berjudul *“Confluence of the Two Seas”*, secara transparan mengatakan bahwa sudah beberapa kali terjadi dalam sejarah bahwa Jepang dan India pernah tertarik satu sama lain, oleh karena itu Jepang dan India memiliki hubungan yang kuat dan niat dalam membentuk sebuah kemitraan yang strategis agar lebih memperluas dan memperkuat hubungan diantara kedua negara (*MOFA: Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, at the Parliament of the Republic of India “Confluence of the Two Seas” (August 22, 2007)*, 2007). Bahkan, pada pidato tersebut, Shinzo Abe memaparkan dengan tegas bahwa kerja sama dalam kawasan tersebut merupakan sebuah keharusan dalam membuat aliansi yang kuat. Oleh karena hal tersebut, penting melihat bahwa kawasan Indo-Pasifik sebagai sebuah kawasan yang mencakup beragam sejarah, kepentingan, dan sistem politik yang akhirnya menjadi pusat persaingan geopolitik global diantara negara-negara besar yang juga dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional tersebut.

Pada bulan Juni 2018, Perdana Menteri India melakukan lawatan ke ajang *Shangri-La Dialogue* yang diselenggarakan di Singapura. Dalam kesempatan tersebut, beliau membahas tujuh unsur penting yang menjadi landasan kerja sama di yang terletak pada kawasan tersebut. Beberapa di antaranya adalah pandangan bahwa Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang terbuka, inklusif, dan bebas. Selain itu, ASEAN dipandang sebagai pusat dari dinamika kawasan Indo-Pasifik. Unsur lainnya meliputi pentingnya aturan yang disepakati secara bersama,

pengendalian yang efektif berdasarkan tujuan bersama yang seragam, serta akses bersama terhadap ruang laut dan luar angkasa dengan penggunaan yang minimal atau tanpa dominasi, hingga menekankan pentingnya konektivitas, globalisasi, dan kerja sama sebagai pendekatan utama, menggantikan pola pikir persaingan, terutama dalam aspek ekonomi (Yadav, 2022).

Melihat akan hal tersebut, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi yang terletak di Asia Tenggara dan berfokus kepada ekonomi dan perdamaian terhadap stabilitas regional yang berlokasi di Asia Tenggara, tentu saja tidak tinggal diam, dikarenakan wilayah mereka juga mencakup sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik (ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah Dan Tujuan, 2022.).

Pada tahun 2019, tepatnya pada 23 Juni ASEAN melakukan sebuah pergerakan baru yang menjadi gebrakan dari visi ASEAN dalam melihat Indo-Pasifik, yaitu dengan mengadopsi pendekatan yang mereka sebut *sebagai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). AOIP sendiri adalah sebuah respon strategis dari ASEAN akibat meningkatnya situasi terhadap ketegangan geopolitik yang terjadi, sehingga pengaruh dari negara-negara yang berada di kawasan tersebut secara tidak langsung mengalami peningkatan (Lin, 2024a). Oleh karena itu, *Outlook* atas adopsi dari ASEAN bertujuan dalam memperlihatkan sentralitas ASEAN di kawasan tersebut yang berdasar kepada mekanisme di ASEAN sendiri. Tidak hanya berfokus kepada hal tersebut, akan tetapi ASEAN juga mendorong adanya kerja sama eksternal yang mencakup beberapa bidang yang diantaranya adalah ekonomi, konektivitas, maritim, dan juga pembangunan berkelanjutan, sehingga ASEAN akan tetap bisa merujuk kepada pematuhan prinsip utama mereka seperti adanya keterbukaan, inklusivitas, dan kerangka kerja yang berbasis regulasi dari kesepakatan mereka.

Berdasarkan dokumen mengenai AOIP yang telah mereka adopsi, ASEAN memegang teguh prinsip mereka melalui yang berdasar kepada penguatan ASEAN sebagai sentralitas, inklusif, transparansi, tata pengelolaan yang baik, non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan melengkapi dalam kerangka kerja sama, hingga yang terpenting menghormati hukum internasional, seperti Piagam ASEAN, hingga yang mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan konvensi PBB, dan sebagainya (*Asean Outlook on the Indo-Pacific,*” 2021).

Sejalan dengan prinsip ASEAN yang menghormati hukum laut, tentunya UNCLOS 1982 sebagai ranah yang menjadi acuan semua negara dalam menghormati dan menaati eksistensi regulasi yang telah tertuang di dalamnya, terkhususnya ASEAN yang menjadi organisasi regional yang sentral dan sangat penting di kawasan tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut, China dan Taiwan mengalami sebuah sengketa laut yang diawali oleh akibat perang langsung dari adanya perang saudara di China. Awalnya, pemerintah Nasionalis yang dipimpin oleh sebuah partai yang bernama Koumintang yang di dirikan oleh Sun Yat-sen, kalah dalam melawan Kekaisaran Qing dengan melakukan sebuah revolusi, sehingga partai ini melarikan diri dan mendirikan Taiwan sebagai pembaruan di China dan pada saat yang sama, mereka mendirikan pemerintahannya di pulau tersebut pada tahun 1949 (*Confrontation Over Taiwan | Global Conflict Tracker*, n.d.).

Meskipun Taiwan memisahkan diri dengan pulau yang berbeda dengan China, akan tetapi China tidak pernah mengambil kendali atas Taiwan, klaim China atas pulau tersebut hanya berdasar kepada pulau yang di klaim oleh kepemilikan Taiwan sebenarnya adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut dari China. Oleh karena itu, China sangat menekankan bahwa pulau yang telah di klaim oleh Taiwan, harus disatukan kembali dengan daratan oleh Tiongkok, meskipun mereka harus menggunakan cara damai ataupun menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya.

Sebagai negara adikuasa di Indo-Pasifik, Amerika Serikat membatalkan perjanjian pertahanan mereka bersama Taiwan pada tahun 1979, yang dimana perjanjian ini telah berjalan kurang lebih selama 25 tahun yang diawali sejak tahun 1954 dibawah pemerintahan Jimmy Carter yang menghormati kebijakan China yang mereka sebut sebagai “*One China Policy*” . Meskipun Amerika Serikat menghormati bahwa kebijakan tersebut, akan tetapi Presiden Jimmy Carter menandatangani sebuah undang-undang yang disebut sebagai “*Taiwan Relations Act*” (TRA), yaitu undang-undang untuk melindungi kepentingan keamanan dan komersialnya bagi Taiwan, sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan di Indo-Pasifik (*Taiwan Relations Act (Public Law 96-8, 22 U.S.C. 3301 et Seq.) - American Institute in Taiwan*, 2022). Lebih lanjut, meskipun TRA telah menjadi kesepakatan diantara Amerika Serikat dan Taiwan, namun TRA tidak mewajibkan Amerika

Serikat untuk membela Taiwan dan memberikan campur tangan dalam konflik tersebut.

Berbeda dengan Amerika Serikat dibawah pemerintahan Jimmy Carter pada masa tersebut. Namun, pada masa pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat sangat gencar dalam membantu Taiwan dalam membela keamanannya. Faktanya, Amerika Serikat secara bertahap mengubah strateginya di Indo-Pasifik, yaitu dengan melihat bahwa China adalah ancaman utama dan Taiwan sebagai sasaran yang paling dominan untuk China dalam melakukan invasinya untuk mendapatkan daerah tersebut kembali menjadi kepemilikan mereka. Hal tersebut tercermin, bahwa Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah memberikan komitmen yang sangat kuat dan transparan untuk melakukan pembelaan dan bantuan untuk Taiwan dari ancaman invasi (*Defending Taiwan – Indo-Pacific Defense FORUM*, 2024).

Menurut (Centre for Strategic and International Studies, 2020), dalam memahami prospek keamanan nasional, keamanan nasional dibagi menjadi aspek, yaitu dengan memperhitungkan keamanan tradisional dan non-tradisional. Dalam pandangan keamanan tradisional, subjeknya berupa negara-negara, sedangkan dalam pandangan keamanan non-tradisional, umumnya berfokus pada ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh *non-state actor* (kelompok subnasional, organisasi supra-nasional, dan individu). Lebih lanjut, ada beberapa jawaban untuk menjawab mengenai keamanan nasional jika kita ingin melakukan sebuah eksplorasi yang luas.

Terdapat beberapa jawaban untuk menjawab mengenai keamanan nasional jika kita ingin melakukan sebuah eksplorasi yang luas. Dalam pandangan keamanan tradisional maupun non-tradisional, fokus utama suatu negara terdapat pada ancaman eksternal, bahkan secara keseluruhan ancaman dapat datang secara internal maupun eksternal yang meliputi militer, politik, ekonomi, siber, lingkungan, nuklir, kepentingan luar negeri, hingga pada aspek masyarakat. Dengan demikian, CSIS secara keseluruhan melihat pemeliharaan kedaulatan dan keamanan nasional sebagai tujuan dalam orientasi nilai keamanan.

Melihat adanya urgensi yang nyata hadir di Indo-Pasifik, China sebagai negara yang mendominasi hampir secara keseluruhan yang meliputi kawasan tersebut, tentu saja menyebabkan adanya ancaman secara langsung terhadap eksistensi, sehingga membatasi dominasi dan pengaruh Amerika Serikat dalam rangka menjaga stabilitas kawasan tersebut (Yadav, 2022). Pada akhirnya,

Amerika Serikat membuat aliansi agar tidak terjadinya dominasi yang mengalami tumpang-tindih di kawasan tersebut, karena hal tersebutlah Amerika Serikat membuat aliansi bersama negara-negara berkemitraan strategis dan tidak terlalu kuat, diantara negara tersebut dibuatlah kerjasama dengan ASEAN, *Quadrilateral Security Dialog* (QUAD), Australia, United Kingdom, United States of America (AUKUS), dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang berfokus di kawasan tersebut. Pendekatan ini diambil oleh Amerika Serikat agar dapat menopang posisinya di kawasan dan terjadinya *balance of power* di Indo-Pasifik.

Merujuk ke dalam buku karya Michael Sheehan dengan judul “*Balance of Power History & Theory*” , Michael Sheehan mengatakan bahwa *Balance of Power* dalam Realisme merujuk kepada perilaku negara dalam sistem internasional yang anarkis. Secara sederhana, keseimbangan kekuatan merupakan sebuah keadaan yang dimana kekuatan negara-negara relatif seimbang, sehingga tidak ada satu negara yang mampu mendominasi yang lainnya secara mutlak, sehingga keseimbangan ini tetap aman dan mencegah dominasi satu kekuatan yang dapat mengancam keberadaan mereka (Giri, 1996.).

Oleh karena itu, pada tahun 7 September, 2023, ASEAN dan Amerika Serikat membuat sebuah kesepakatan yang fundamental dalam kerja sama mereka, hal tersebut tercermin dalam *AOIP and the United States’ Indo-Pacific Strategh (IPS)*, yang telah mereka sepakati dalam KTT ASEAN-Amerika Serikat ke-11 yang diadakan di Jakarta pada saat itu (*ASEAN-U.S. Leaders’ Statement on Cooperation on The ASEAN Outlook on The Indo-Pacific - ASEAN Main Portal, 2023*). Bahkan, dalam dokumen yang telah mereka buat, mereka menegaskan kembali akan pentingnya penegakan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan Piagam ASEAN, *Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, UNCLOS 1982, dan dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), hingga kepada *AOIP*.

Melihat hal yang telah disebutkan sebelumnya dan kuatnya aliansi yang berada di Indo-Pasifik, mungkin bisa timbul suatu pertanyaan, apa Peran ASEAN melalui AOIP nya dalam menjaga stabilitas regional mereka agar tidak mengalami eskalasi lebih jauh. Dengan demikian, penelitian dari jurnal yang diangkat ini akan menelusuri lebih dalam terkait dengan bagaimana AOIP mengatasi permasalahan terkait stabilitas yang ada di Indo-Pasifik, bagaimana posisi dan penerapan UNCLOS terhadap Taiwan yang bukan merupakan anggota PBB, serta

menganalisis bagaimana motif China melakukan claim sehingga dapat bersitenggang dengan Taiwan melalui pandangan UNCLOS.

B. LITERATURE REVIEW

Melihat kompleksitas yang ada di kawasan Indo-Pasifik, terkhususnya bagaimana ASEAN dengan AOIP nya dapat menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan tersebut, hingga penerapan dan pandangan UNCLOS 1982 terhadap dua negara yang bersitenggang, ternyata masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Untuk membantu dalam menelaah lebih dalam mengenai upaya ASEAN melalui AOIP nya sehingga dapat menjaga negara stabilitas perbatasan negara lain yang juga secara tidak langsung mendapatkan ancaman akibat dari perselisihan China dan Taiwan, penulis telah mengadakan review literatur terhadap tiga penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang akan dikaji.

Literatur awal yang berjudul *Understanding Indonesia's role in the ' ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ' : A role theory approach*. Karya I Gusti Bagus Dharma Agastia membahas mengenai peran Indonesia dalam kerangka geopolitik regional dan global, khususnya dalam konteks Indo-Pasifik. Melalui pendekatan teori peran (role theory), studi ini menyoroti bagaimana Indonesia memposisikan dirinya sebagai aktor penting yang berusaha menyeimbangkan antara kerjasama dan kompetisi di kawasan tersebut. Indonesia dipandang sebagai kekuatan menengah yang mampu memainkan peran sebagai pemimpin regional, jembatan penghubung, dan fasilitator dalam membangun stabilitas dan kerjasama multilateral. Dalam konteks ini, Indonesia menafsirkan konsep Indo-Pasifik sebagai bagian dari identitas dan posisi strategisnya, yang diterima baik oleh aktor utama seperti China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Negara-negara besar tersebut melihat Indonesia sebagai aktor yang konstruktif dan mampu mengelola peran yang sesuai dengan persepsi dirinya, sehingga memperkuat posisinya sebagai aktor yang aktif membentuk arsitektur kawasan.

Salah satu inisiatif penting yang didukung Indonesia adalah *AOIP*, yang menegaskan pendekatan inklusif dan berbasis ASEAN dalam membangun kerjasama kawasan. Indonesia mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, damai, dan stabil melalui mekanisme yang sudah ada, bukan menciptakan yang baru, dan mendapatkan dukungan dari berbagai negara besar yang melihatnya sebagai langkah konstruktif. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa

Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta pasif, tetapi aktif dalam membentuk dan memimpin inisiatif regional, menunjukkan bahwa negara dengan kekuatan menengah dapat memainkan peran strategis melalui diplomasi yang cerdas dan penempatan posisi yang tepat dalam dinamika geopolitik kawasan dan global (Agastia, 2020). Penulis dari jurnal ini berusaha menjelaskan peran Indonesia dalam kerangka geopolitik regional dan global, khususnya dalam konteks Indo-Pasifik. Mereka mengkaji bagaimana Indonesia memposisikan dirinya sebagai aktor penting yang mampu menyeimbangkan antara kerjasama dan kompetisi di kawasan tersebut melalui pendekatan teori peran (role theory).

Literatur kedua yang berjudul *Asean's Role in The Settlement of International Disputes on China's Aggression Against Taiwan*. Karya dari Ega Permatadani, Ida Ayu Rosida, dkk, membahas mengenai Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai dinamika geopolitik di kawasan Asia-Pasifik, khususnya terkait dengan ketegangan antara China, Taiwan, dan peran organisasi regional seperti ASEAN. Dalam konteks ini, China memandang Taiwan sebagai wilayah yang memberontak dan menentang kemerdekaannya, dengan kekhawatiran bahwa dukungan internasional terhadap Taiwan, terutama dari Amerika Serikat, dapat mengubah keseimbangan kekuatan global dan memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut. Amerika Serikat sendiri mendukung Taiwan melalui bantuan militer, yang semakin memperumit hubungan antara China dan AS serta meningkatkan risiko konflik militer di kawasan. China menunjukkan agresi militer terhadap Taiwan, termasuk tindakan yang melanggar hukum internasional dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan seperti penggunaan senjata kimia dan nuklir, yang dapat mengancam stabilitas regional dan negara-negara tetangga. Dalam konteks ini, ASEAN berperan penting sebagai organisasi regional yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional dan perjanjian yang berlaku, seperti Piagam PBB dan perjanjian ASEAN.

Paper ini menekankan pentingnya kerjasama regional, diplomasi, dan penegakan hukum internasional dalam rangka menghalangi eskalasi pertikaian dan memelihara keamanan di Asia-Pasifik. Selain itu, artikel ini juga membahas peran ASEAN dalam menyikapi agresi China terhadap Taiwan, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif ASEAN dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional melalui pendekatan hukum dan norma internasional, serta menegaskan perlunya dialog dan negosiasi damai sebagai solusi utama untuk mengatasi ketegangan yang

terus meningkat di kawasan tersebut (Maulana et al., 2023). Penulis dari jurnal ini berusaha menjelaskan dinamika dan kompleksitas hubungan internasional di kawasan Asia-Pasifik, khususnya terkait konflik antara China dan Taiwan serta peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa tersebut. Mereka menyoroti ketegangan yang meningkat akibat agresi China terhadap Taiwan dan dukungan internasional terhadap Taiwan, termasuk peran Amerika Serikat yang memperumit situasi. Selain itu, penulis menekankan pentingnya kerjasama regional, diplomasi, dan penegakan hukum internasional dalam mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.

Literatur ketiga dengan judul *South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN Waters*. Karya Rifqi Setia Wardhana menjelaskan mengenai Jurnal ini membahas secara mendalam upaya ASEAN dalam menangani ancaman keamanan di Laut China Selatan, terutama dalam konteks klaim teritorial sepihak dan aktivitas militer yang dilakukan oleh China. Penulis menyoroti bagaimana ASEAN merespons tantangan ini melalui forum regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF) untuk memperkuat kerjasama keamanan maritim di kawasan tersebut. Dalam analisisnya, penulis menggunakan teori sekuritisasi dan kerangka kerja kerjasama internasional untuk memahami strategi keamanan ASEAN, dengan menekankan pentingnya aksi kolektif guna menjaga stabilitas regional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan sengketa sumber daya.

Selain itu, jurnal ini juga mengulas berbagai aspek terkait sengketa di Laut China Selatan, termasuk konflik kedaulatan, tantangan keamanan, upaya diplomatik, serta peran ASEAN dan negara-negara lain seperti China, Vietnam, dan Indonesia dalam dinamika geopolitik kawasan. China dengan klaim sepihak dan aktivitas militernya menjadi ancaman utama terhadap stabilitas regional, yang mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama melalui langkah diplomatik, hukum internasional seperti UNCLOS, serta pengembangan kode etik bersama dengan China. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, konflik dan ketegangan masih belum terselesaikan, menunjukkan perlunya diplomasi multilateral yang berkelanjutan agar perdamaian dan stabilitas di kawasan dapat dipertahankan (Wardhana, 2021). Penulis berusaha menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengelola sengketa ini sangat bergantung pada kolaborasi internasional dan komitmen bersama dari semua pihak terkait.

Literatur-literatur yang telah disebutkan sebelumnya telah memberikan kontribusi yang terbilang cukup signifikan kepada penelitian penulis dalam memaparkan terkait bagaimana stabilitas keamanan Indo-Pasifik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) dapat memengaruhi dinamika ketegangan antara China dan Taiwan, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa maritim yang lebih luas. Ketegangan tersebut tidak terlepas dari motif strategis dan kepentingan nasional China yang secara konsisten menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatannya. Klaim ini sejalan dengan pendekatan hegemonik China di Laut China Selatan, yang tidak hanya dilandasi oleh potensi sumber daya alam dan posisi strategis jalur pelayaran internasional, tetapi juga sebagai bentuk proyeksi kekuatan dan pengaruh geopolitik di kawasan. Tindakan agresif China, baik terhadap wilayah-wilayah yang disengketakan seperti Paracel dan Spratly maupun terhadap Taiwan, menunjukkan penggunaan kekuatan militer sebagai alat politik luar negeri, yang pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara ASEAN.

Di tengah dinamika ini, AOIP hadir sebagai inisiatif diplomatik yang menekankan inklusivitas, transparansi, supremasi hukum, serta sentralitas ASEAN sebagai aktor utama dalam menciptakan ruang dialog dan kerja sama kawasan. Indonesia, sebagai inisiator utama AOIP, memainkan peran penting sebagai *middle power* dan *bridge-builder* dalam menavigasi rivalitas kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat, sekaligus menjaga ASEAN agar tidak terseret ke dalam konflik terbuka. AOIP menjadi wadah normatif yang berupaya menghindari polarisasi kawasan dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas berdasarkan prinsip perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dalam konteks ini, ketegangan China-Taiwan tidak hanya dilihat sebagai konflik bilateral semata, melainkan bagian dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas regional secara keseluruhan, sehingga mendorong ASEAN untuk memperkuat kapasitas kolektifnya melalui mekanisme seperti AOIP. Dengan demikian, penelitian ini menelaah secara komprehensif bagaimana kepentingan strategis China terhadap Taiwan serta langkah ASEAN melalui AOIP saling berinteraksi dalam membentuk struktur keamanan maritim Indo-Pasifik yang lebih stabil, inklusif, dan bebas dari dominasi kekuatan tunggal.

C. Metode Penelitian

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian ini menggunakan sebuah metode yaitu berupa pendekatan kualitatif dengan kerangka berpikir korelasional, yang berupa menelaah hubungan yang berasal dari peran AOIP dalam menjaga stabilitas kawasan dan ketegangan China-Taiwan melalui analisis dokumen kebijakan, dan studi kasus historis. Lebih lanjut, validitas data dalam penelitian ini juga menggunakan *teknik triangulasi sumber*, yaitu dengan melakukan komparasi dan mengonfirmasi data dari berbagai dokumen resmi yang kredibel, terkhususnya seperti melalui kebijakan ASEAN yang berasal dari AOIP, artikel jurnal ilmiah, buku, serta beberapa analisis yang bersumber dari lembaga think tank regional, seperti CSIS. Dengan demikian, validitas data yang disertakan secara purposive dengan kriteria relevansi terhadap isu stabilitas Indo-Pasifik dan konflik China-Taiwan.

D. Hasil dan Diskusi

Ketegangan yang diakibatkan antara China dan Taiwan yang telah lama berlangsung sejak akhir Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1927-1949, telah menyebabkan terjadinya klaim teritorial dan disintegrasi yang membuat China melakukan claim kepada Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka. Hal ini berdasar kepada prinsip *One China Policy* yang diadopsi secara internasional dan mendapatkan dukungan kehormatan oleh Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Jimmy Carter. Melalui pendekatan tersebut, China terus menekankan segala macam cara mereka untuk mengambil kembali bagian dari wilayahnya, baik itu dilakukan secara damai, maupun dengan pendekatan militer untuk mengancam kedaulatan Taiwan.

Pendekatan melalui keamanan maritim melihat dengan jelas bahwa upaya China dalam melakukan ancaman semakin agresif, dikarenakan mereka secara besar-besaran melakukan klaim hingga sekarang akibat mereka masih menganggap bahwa wilayah tersebut masih di dalam yurisdiksi mereka. Oleh karena itu, mereka mengerahkan kapal penjaga pantai, hingga armada laut ke wilayah Selat Taiwan dalam rangka melakukan latihan militer dan menimbulkan ancaman kepada Taiwan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan pada regional. Sebenarnya, menurut (UNCLOS 1982) hal ini masih tergolong sah, dikarenakan mereka masih

melakukan latihan militer di wilayah yurisdiksi mereka sendiri, hal tersebut juga didukung dengan jejak historis yang dimiliki oleh China.

Dengan demikian, lahirlah AOIP sebagai arah ASEAN dalam menjaga stabilitas di Indo-Pasifik, dengan pendekatan berupa kerjasama regional secara transparan dengan negara-negara Indo-Pasifik, hingga membuka dialog bersama dengan China dalam rangka mendorong penyelesaian konflik. Oleh karena itu, ASEAN menunjukkan bahwa AOIP bukan hanya sekedar kerangka kebijakan, akan tetapi melalui pendekatan tersebut ASEAN berupaya meredam konflik yang melibatkan perang China dan Taiwan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan regional.

Motif strategis dan kepentingan nasional China yang mendasari klaim terhadap wilayah Taiwan

Perang saudara yang terjadi di China pada sekitaran tahun 1927-1949, mengakibatkan terpisahnya China menjadi dua yang dimana pada saat yang sama berdirilah Republik Rakyat China (RRC) yang mempunyai kendali atas China daratan yang pada akhirnya terbentuknya Republik China atau yang kita kenal sekarang sebagai Taiwan. Lebih lanjut, China selama berpuluh-puluh tahun telah membuat Taiwan untuk kembali masuk menjadi bagian dari mereka sebagai satu kesatuan, dikarenakan China beranggapan bahwa pulau yang menjadi okupansi dari Taiwan tersebut merupakan bagian dari wilayah China dan masuk ke dalam yurisdiksi mereka (Akhir Dari Perang Saudara China Dan Sejarah Berdirinya Taiwan, 2021).

Sejak saat itu, Taiwan secara sepihak membangun sistem kenegaraan mereka yang terdiri dari pemerintahan, pembentukan undang-undang domestik, hingga memiliki kepala negara dan angkatan bersenjata yang disertai militer (Mengapa Taiwan Tak Dianggap Sebagai Suatu Negara?, 2022). Lebih lanjut, pada tahun 1945-1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui adanya keberadaan suatu negara yang bernama Republik China tau yang dikenal resmi pada saat sekarang sebagai Taiwan. Bahkan pada saat tersebut, PBB mengakuinya sebagai salah satu anggota dari organisasi internasional tersebut. Oleh karena itu, selepas penjajahan Jepang yang diakhiri oleh Perang Dunia II, pada akhirnya status Republik China menjadi sebuah pertanyaan di PBB, apakah mereka masih menjadi satu China, atau sudah menjadi bagian yang terpisah secara sistem kenegaraan, pemerintahan, maupun yang lainnya.

Pada akhirnya, siding umum PBB pada tahun 1971 mengeluarkan sebuah resolusi 2758 tentang *Restoration of the lawful rights of the People ' s Republic of China in the United Nations* (United Nations, 1972). Resolusi ini menyatakan bahwasannya PBB hanya mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau yang kerap dikenal sebagai China, yang hanya menjadi perwakilan tunggal sebagai anggota di PBB, hingga tidak terdapatnya pengakuan Taiwan sebagai bagian dari sebuah negara yang baru terbentuk pada saat itu. Sehubungan dengan hal tersebut, akhirnya China mengeluarkan sebuah kebijakan mereka yang dikenal luas sekarang sebagai *One China Policy*.

Kebijakan satu China (*One China Policy*), merupakan terobosan dari China yang dimana mereka mengatakan bahwa posisi China hanya ada satu dalam pemerintahannya (*What Is the "One China" Policy? - BBC News, 2021*). Melalui kebijakan tersebut juga, dibawah kepemimpinan Amerika Serikat yaitu Jimmy Carter, hubungan dari China-Amerika mulai menjadi sangat kuat akibat dari salah satu kerjasama hubungan diplomatik dan saling mengakui yang diawali pada 1 Januari 1979 (*Jimmy Carter: The US President Who Became China's Friend, 2024*). Sebelumnya, Amerika Serikat hanya mengakui pemerintah Taiwan pada beberapa dekade sebelumnya, akan tetapi pengakuan Amerika Serikat melalui One China Policy menjadi sebuah kabar yang sangat gembira bagi China dan hal tersebut menjadi landasan dari hubungan China-Amerika Serikat.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, terdapat beberapa aspek kesepakatan yang berkaitan secara langsung dengan Tiongkok, diantaranya adalah Pengakuan China sebagai satu-satunya pemerintahan sah. Kemudian makna dari "Pengakuan" tersebut mendeskripsikan tentang posisi China dimana tidak mengakui bahwa Taiwan merupakan bagian dari kedaulatan China yang merujuk kepada prinsip *One China Policy*. Aspek selanjutnya, mengenai solusi apapun terhadap perbedaan lintas Selat akan diselesaikan secara damai. Di sisi lain, kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan mencakup hal-hal terkait pengakhiran Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1954. Bahkan, Washington mendefinisikan bahwa status pulau Taiwan "Belum ditentukan," dengan pemerintah yang berkuasa tidak dianggap sebagai negara berdaulat dalam sistem internasional. Dengan demikian, Amerika Serikat memiliki hak untuk menyediakan persenjataan pertahanan kepada Taiwan guna melawan segala bentuk penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat dikatakan menyebabkan pembahayaan terhadap keamanan,

maupun berupa ekonomi dan sistem sosial yang terkait erat bersamaan dengan rakyat Taiwan, hingga terdapatnya ketentuan bagi presiden dan Kongres untuk melakukan konsultasi terkait tindakan lebih lanjut jika terjadi ancaman terhadap Taiwan (*Understanding the One China Policy*, 2023).

Melihat kerjasama yang terjadi dan segala ketentuan di dalamnya, hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat guna untuk mereduksi atau mencegah adanya eskalasi yang sangat parah, yang mungkin di masa depan China berusaha untuk melakukan okupansi secara keseluruhan kepada Taiwan akibat dari adanya rasa kepemilikan mereka terhadap daerah yang dianggap oleh mereka sebagai kepemilikan dari mereka merujuk kepada sejarah yang diakibatkan oleh pemisahan dari perang saudara. Di samping itu, kepentingan nasional China tentu saja terlihat, apalagi jika kita melihat melalui hukum laut internasional yang dimana tentunya bebas untuk melakukan eksplorasi atau berlalu-lalang dibagian wilayah yang termasuk ke dalam yurisdiksi mereka. Oleh karena itu, motif strategis dan kepentingan nasional China dapat dijabarkan dengan lebih rinci di bawah ini:

A. Hukum Laut Domestik

Strategi China untuk menguatkan kepemilikan mereka terhadap Taiwan, sangat tercermin dengan jelas dalam pengertian dari kepentingan nasional. Kepentingan Nasional, berasal dari sebuah negara dengan tujuan dan ambisi yang dilakukan dengan tujuannya terkandung beberapa aspek yang diantaranya mencakup militer, ekonomi, budaya, maupun yang lainnya dalam rangka melakukan hubungan internasional (Bainus & Rachman, 2018). Lebih lanjut, strategi hukum domestik yang dibalut dengan kepentingan nasional China, membuat mereka menggunakan pendekatan Penjaga Pantai Tiongkok dan Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim dalam rangka memperkuat dasar blokade mereka (*PRC Uses Legal Warfare to Support Maritime Blockade Against Taiwan - Jamestown*, 2025). Bahkan, melalui pendekatan tersebut, China tidak hanya terbatas dalam mengerahkan Kapal Penjaga Pantai, akan tetapi mereka juga mengerahkan Angkatan Laut Tentara dalam rangka mencegak, menahan, hingga mengatur kapa lasing di perairan yang mereka persengketakan, hal ini juga mencakup eksplorasi kapal militer dari Taiwan, yang tentunya membuat pergerakan mereka sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada 26 Februari 2025, China melaksanakan sebuah latihan militer yang disebut sebagai “*live-fire drills*” (*Taiwan*

Condemns China for “shooting” Drills off Taiwanese Coast | Reuters, 2025). Latihan militer ini secara hukum internasional dikatakan sah, dikarenakan China masih melakukan latihan di wilayah mereka, namun yang menjadi permasalahan adalah Taiwan yang merasa terancam akibat dari adanya latihan militer tersebut. Pasalnya, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi terdapatnya kurang lebih 32 pesawat militer beserta kapal perangnya yang berada di wilayah Selat Taiwan. Melihat hal tersebut, sudah sangat jelas bahwasannya upaya China untuk merebut kembali wilayahnya sangat tercermin dengan bagaimana mereka dapat melakukan dominasi di sana dengan membuat pendekatan berupa memamerkan kekuatan mereka dalam konteks militer meskipun hanya berupa latihan.

B. Hukum Laut Internasional

Menurut (United Nations Convention on The Law of The Sea, 1982) tentang lintas damai pada pasal 17, mereka mengartikan bahwasannya kendaraan laut seperti halnya kapal yang berasal dari negara-negara lain, entah yang berasal dari pantai maupun yang bukan pantai, mempunyai keistimewaan dalam hak lintas damai sesuai yang diatur di dalam hukum internasional, UNCLOS. Sehubungan dengan hal tersebut, korelasi diantara latihan militer yang telah dilaksanakan oleh China, meskipun berapa di dekat perairan Taiwan, dapat dikatakan legal karena masih masuk ke dalam wilayah perairan berdasarkan yurisdiksi mereka (*MOFA Kecam Keras Latihan Militer Tiongkok, Desak Tiongkok Tidak Mencari-Cari Alasan Memicu Konflik, 2024*). Balasnya, Taiwan sendiri mengatakan hal yang sebaliknya, mereka mengatakan bahwasannya China berupaya untuk membuat sebuah perencanaan dari China dalam tindakan provokasi terhadap keamanan di Selat Taiwan, hingga menimbulkan ketidakstabilan pada kawasan disekitaran Indo-Pasifik.

Melalui pendekatan tersebut, China berupaya untuk menunjukkan sebesar apa kekuatan yang mereka miliki di perairan kawasan Indo-Pasifik, terkhususnya juga bahwa China masih menerapkan Kebijakan Satu China mereka hingga sekarang, meskipun hal tersebut dapat merusak perdamaian dan stabilitas regional.

Efektivitas AOIP dalam mekanisme regional dalam mencegah eskalasi konflik di Indo-Pasifik

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi tunggal di Asia Tenggara yang tentunya bersifat regional dan berdomisi di Jakarta, Indonesia. Organisasi pada awalnya didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan hanya terdiri dari 5 negara, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Namun, seiring berjalannya waktu, keanggotaan lainnya disusul oleh Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam (*About ASEAN - ASEAN Main Portal, 2025*).

Pada awal pembentukannya, ASEAN dibentuk sebagai struktur organisasi yang fokus utama ke bidang liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi regional. Hal ini tercermin dari upaya ASEAN untuk membangun kawasan perdagangan bebas, seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, yang pertama kali didirikan sejak disekitaran tahun 1992 dengan tujuan mengintegrasikan ekonomi negara-negara anggotanya melalui penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Bahkan, ASEAN pada awalnya lebih menitikberatkan pada kerjasama ekonomi dan perdagangan daripada aspek hukum, institusional, atau politik yang lebih dalam (Jetschke, 2017).

Seiring berkembangnya organisasi regional ini, pada tahun 2019 lahirlah sebuah pendekatan baru dari ASEAN yang disebut sebagai *AOIP* yang telah menjadi acuan dari arus arah ASEAN sebagai aktor utama dalam rangka menjaga kawasan mereka dari berbagai benturan kekuatan-kekuatan yang berupaya melakukan dominasi, sehingga persaingan kepentingan di kawasan Indo-pasifik dapat menjadi sangat tajam (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan Dan Tantangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Spesifiknya, merujuk kepada prinsip dari ASEAN melalui AOIP, pandangan ASEAN melalui Indo-Pasifik tentunya berdasarkan kepada pusat dari ASEAN, adanya transparansi, inklusivitas, keterbukaan dan kerangka yang berbasis peraturan, hingga penghormatan dan kepatuhan kepada hukum internasional, seperti contohnya yang terkandung dalam piagam PBB, UNCLOS 1982, hingga yang lainnya (ASEAN, 2019). Oleh karena itu, AOIP dari ASEAN ini berupaya menegaskan peran mereka sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik, terutama dari adanya ancaman, ketidakstabilan kekuatan, hingga mereduksi

konflik melalui serangkaian dialog dan kerjasama dibandingkan menekankan persaingan dalam rangka kemajuan kawasan.

Dalam pendekatannya, tentu saja AOIP tidak akan berjalan dengan efektif dan maksimal tanpa adanya bantuan dari negara-negara lain dalam rangka melaksanakan stabilitas di kawasan, sekaligus mencegah eskalasi yang lebih luas dari konflik China-Taiwan. Pasalnya, pada 6 September 2023 ketika diadopsinya AOIP ini melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-Amerika Serikat (*KTT Ke-11 ASEAN-AS Adopsi Dokumen Dukungan Kerja Sama Dalam AOIP*, 2023). Kerjasama ini bukan hanya melakukan pendekatan yang terbatas pada keamanan saja di Indo-Pasifik, akan tetapi melalui AOIP, kemitraan ini dapat meningkatkan ketahanan energi, pangan, dan mengatasi penghambatan dari perubahan iklim dan pembangunan negara berkembang. Lebih lanjut, komitmen ini juga menekankan bahwa Amerika-Serikat mendukung sentralitas dari ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan mereka.

Di sisi lain, tepat pada hari yang sama dari diadopsinya AOIP bersama dengan Amerika Serikat, Jepang juga melakukan hal yang sama dalam kemitraan strategis diantara ASEAN-Jepang melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN Jepang (*ASEAN-Jepang Sepakat Bentuk Kemitraan Strategis Komprehensif*, n.d.). Melalui konferensi ini, terdapat beberapa kesepakatan yang ditandai dengan ASEAN-Jepang sebagai teman dalam melakukan kerjasama, keberlanjutan ASEAN-Jepang ekonomi dalam hal sumber daya manusia, dan pengembang inovasi, serta *ASEAN-Japan Economic Co-Creation Vision*. Lebih lanjut, pada konferensi ini juga menekankan dengan keras bahwa, pemimpin negara penting dalam pengawasan situasi yang aman pada sekitaran kawasan, yang diawali dari Korea dan Laut China Selatan yang menjadi titik konflik yang sering diawali oleh China.

Meskipun telah membuat kerjasama dan kesepakatan dengan negara-negara besar, terdapat juga keterbatasan pengimplementasian AOIP, yang dimana AOIP menunjukkan bahwa meskipun dokumen ini tidak memiliki dimensi strategis yang kuat, AOIP berhasil mendapatkan dukungan dari mitra eksternal ASEAN karena sifatnya yang netral, tidak memihak, dan berfokus pada kerjasama daripada rivalitas (Lin, 2024b). Dukungan ini berasal dari berbagai negara seperti China, India, Jepang, AS, Australia, dan Korea Selatan, yang menganggap AOIP sebagai platform yang inklusif dan konstruktif dalam membangun hubungan regional.

Namun, AOIP memiliki keterbatasan signifikan dalam hal dampak strategis, terutama dalam mengelola ancaman eksternal dan ketegangan geopolitik, seperti yang dihadapi ASEAN terhadap China. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya dimensi strategis dan komponen kekuatan keras (*hard power*), sehingga tidak mampu secara efektif mencegah konflik atau menyeimbangkan kekuatan di kawasan. ASEAN cenderung menghindari sikap keras terhadap China terkait sengketa di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang menyebabkan AOIP tidak mampu secara aktif mengatasi tantangan keamanan utama di kawasan. Oleh karena itu, ASEAN berusaha menjaga keseimbangan dan menghindari sikap yang memperburuk ketegangan dengan tidak secara terbuka mendukung salah satu pihak dalam konflik China-Taiwan (Lin, 2024b).

Dengan demikian, ASEAN berusaha menjaga keseimbangan dengan menghindari sikap yang terlalu condong ke salah satu pihak dan menekankan pentingnya penyelesaian damai serta dialog terbuka sebagai jalan keluar dari konflik. Oleh karena itu, AOIP berfungsi sebagai kerangka kerja yang mempromosikan kerjasama yang konstruktif dan stabil di kawasan Indo-Pasifik, dengan mengedepankan prinsip-prinsip multilateralitas dan penghormatan terhadap kedaulatan, sehingga berupaya mengurangi risiko eskalasi konflik yang lebih luas antara China dan Taiwan.

Namun, jika melihat efektivitas AOIP dalam mencegah eskalasi di Indo-Pasifik yang diakibatkan oleh China-Taiwan apakah benar-benar efektif dalam menghentikan dan mencegah secara utuh, tentu saja hal tersebut belum tercermin dengan jelas. Pasalnya, pada 21 Mei 2025, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China melakukan sebuah latihan militer amfibi secara besar-besaran dan membuat dunia internasional memunculkan kekhawatiran dikarenakan demonstrasi kekuatan yang dipunyai oleh China menyimbolkan akan terjadinya potensi eskalasi konflik di kawasan tersebut (China's Bold Amphibious Drill near Taiwan Sparks Global Alarm, 2025).

Meskipun Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya aktivitas militer China melalui latihannya, ASEAN sebagai pilar utama di dalam kawasan ini belum memberikan reaksi atau komentar apapun, meskipun latihan ini juga membuat blokade secara tidak langsung kepada jalur pelayaran internasional dikarenakan operasi militer berskala besar di sekitar Selat Taiwan tersebut.

E. Kesimpulan

Serangkaian kepentingan China yang berada di sekitaran Indo-Pasifik, terkhususnya di sekitaran Selat Taiwan, telah menyebabkan eskalasi berkelanjutan akibat dari operasi militer yang mereka lakukan dalam rangka menyebarkan threat kepada Taiwan. Melihat akan hal tersebut, China secara langsung dan tidak langsung menyebabkan struktur stabilitas keamanan Indo-Pasifik terganggu, sehingga banyak negara-negara yang turut andil masuk ke dalam konflik ini untuk melakukan stabilitas di kawasan ini.

Di sisi lain, Amerika, Jepang, hingga ASEAN melakukan serangkaian perjanjian dan kerjasama dalam rangka melakukan stabilitas di kawasan tersebut agar eskalasi yang diakibatkan oleh China tidak berlangsung dengan sangat panjang, yang pada akhirnya bisa saja berdampak kepada negara-negara lain di kawasan tersebut. Bahkan, AOIP yang berasal dari prinsip ASEAN dalam mengawasi keseimbangan kawasan mereka, sepertinya tidak dapat diimplementasikan secara efektif, hal ini merujuk kepada pengimplementasian AOIP tetap berjalan dari awal hingga sekarang akan tetapi tetap saja terjadi eskalasi.

Merujuk kepada perbedaan penyelesaian konflik dari beberapa presiden Amerika Serikat sebelumnya dalam memandang konflik ini sebagai bagian dari kepentingan mereka, dapat tercermin dengan sangat jelas. Pada tahun 1979, Jimmy Carter berupaya untuk melakukan normalisasi diantara China-Taiwan, akan tetapi dengan suatu syarat yaitu hanya China yang diakui. Sedangkan pada tahun 2021-2024, Joe Biden mempunyai serangkaian kepentingan untuk menekan China, seperti halnya pernyataan dalam mendukung Taiwan, hingga penjualan senjata, penguatan kerja sama di kawasan. Sedangkan Trump pada tahun 2025, melakukan hal yang sangat strategis dengan meningkatkan tarif impor kepada China agar mereka secara tidak langsung berfokus kepada urgensi perdagangan mereka dibandingkan konflik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Agastia, I. G. B. D. (2020). Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A role theory approach. *Asia and the Pacific Policy*

Studies, 7(3), 293–305.
<https://doi.org/10.1002/APP5.308;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:20502680;WGROU:STRING:PUBLICATION>

Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109–115. <https://doi.org/10.24198/INTERMESTIC.V2N2.1>

Berkofsky, A., & Miracola, S. (2019). *Geopolitics by other means*. Ledizioni - LediPublishing. <https://doi.org/10.14672/67059287>

Centre for Strategic and International Studies. (2020). Ideological Security as National Security. *Comparative Government*, 52–59. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15318-3_7

Giri, N. (n.d.). *Balance of Power Theory in Present International System*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19997.64489>

Jetschke, A. (2017). What Drives Institutional Reforms in Regional Organisations? Diffusion, Contextual Conditions, and the Modular Design of ASEAN. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 5(1), 173–196. <https://doi.org/10.1017/TRN.2016.30>

Maulana, I., Islamy, F., Baiquni, M. I., Hanafie, N. K., Rahman, R., & Muin, F. (2023). Asean's Role in The Settlement of International Disputes on China's Aggression Against Taiwan. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 3(2), 139–149. <https://doi.org/10.31000/IJLP.V3I2.7145>

Wardhana, R. S. (2021). The South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN Waters. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.29303/IJPSS.V3I1.56>

Artikel Website

Akhir dari Perang Saudara China dan Sejarah Berdirinya Taiwan. (n.d.). Retrieved May 23, 2025, from <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/30/114334970/akhir-dari-perang-saudara-china-dan-sejarah-berdirinya-taiwan?page=all>

ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah dan Tujuan. (n.d.). Retrieved April 18, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan>

China's bold amphibious drill near Taiwan sparks global alarm. (n.d.). Retrieved May 25, 2025, from <https://bulgarianmilitary.com/2025/05/21/chinas-bold-amphibious-drill-near-taiwan-sparks-global-alarm/>

Confrontation Over Taiwan | Global Conflict Tracker. (n.d.). Retrieved April 19, 2025, from <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-over-taiwan>

Defending Taiwan – Indo-Pacific Defense FORUM. (2024, November 12). <https://ipdefenseforum.com/2024/11/defending-taiwan/>

Mengapa Taiwan Tak Dianggap sebagai Suatu Negara? (n.d.). Retrieved May 23, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220904071709-113-842940/mengapa-taiwan-tak-dianggap-sebagai-suatu-negara>

MOFA Kecam Keras Latihan Militer Tiongkok, Desak Tiongkok Tidak Mencari-Cari Alasan Memicu Konflik. (2024). <https://id.taiwantoday.tw/politik/260223/mofa-kecam-keras-latihan-militer-tiongkok,-desak-tiongkok-tidak-mencari-cari-alasan-memicu-konflik>

MOFA: Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, at the Parliament of the Republic of India “Confluence of the Two Seas” (August 22, 2007). (2007). <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>

PRC Uses Legal Warfare to Support Maritime Blockade Against Taiwan - Jamestown. (2025, March 15). <https://jamestown.org/program/prc-uses-legal-warfare-to-support-maritime-blockade-against-taiwan/>

Taiwan condemns China for “shooting” drills off Taiwanese coast | Reuters. (2025, February 26). <https://www.reuters.com/world/china/taiwan-flags-chinas-shooting-drills-off-southwest-coast-2025-02-26/>

Taiwan Relations Act (Public Law 96-8, 22 U.S.C. 3301 et seq.) - American Institute in Taiwan. (2022, March 30). <https://www.ait.org.tw/taiwan-relations-act-public-law-96-8-22-u-s-c-3301-et-seq/>

Understanding the One China policy. (2023, August 31). <https://www.brookings.edu/articles/understanding-the-one-china-policy/>

What is the “One China” policy? - BBC News. (2021). <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354>

Buku

Yadav, A. S. (2022a). *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik.* Elex Media Komputindo.
[//perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322](http://perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322)

Yadav, A. S. (2022b). *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik.* Elex Media Komputindo.
[//perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322](http://perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322)

Yadav, A. S. (2022c). *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik.* Elex Media Komputindo.
[//perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322](http://perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322)

Dokumen & Pernyataan

ASEAN-Jepang Sepakat Bentuk Kemitraan Strategis Komprehensif. (n.d.). Retrieved May 25, 2025, from <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/asean-jepang-sepakat-bentuk-kemitraan-strategis-komprehensif/>

ASEAN-U.S. Leaders' Statement on Cooperation on The ASEAN Outlook on The Indo-Pacific - ASEAN Main Portal. (2023, September 6). <https://asean.org/asean-u-s-leaders-statement-on-cooperation-on-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific/>

“ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC.” (n.d.).

ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah dan Tujuan. (n.d.). Retrieved April 18, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan>

KTT Ke-11 ASEAN-AS Adopsi Dokumen Dukungan Kerja Sama dalam AOIP. (2023). <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/ktt-ke-11-asean-as-adopsi-dokumen-dukungan-kerja-sama-dalam-aoip/>

Lin, J. (2024a). 2024/9 “*Advancing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Beyond Indonesia's Chairmanship*” by Joanne Lin. /articles-commentaries/iseas-perspective/2024-9-advancing-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-beyond-indonesias-chairmanship-joanne-lin/

Lin, J. (2024b). 2024/9 “*Advancing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Beyond Indonesia's Chairmanship*” by Joanne Lin (Vol. 2024, Issue No. 9). /articles-commentaries/iseas-perspective/2024-9-advancing-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-beyond-indonesias-chairmanship-joanne-lin/

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). <https://setkab.go.id/implementasi-asean-outlook-on-the-indo-pacific-melalui-asean-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/>

United Nations Convention on the Law of the Sea. (n.d.). Retrieved May 23, 2025, from https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part2.htm

UN. G. A. (26th sess. : (1972). *Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations.* <https://digitallibrary.un.org/record/192054>